

**SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL
DI JAWA TENGAH**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

P R A K A T A

Tujuan Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan penyebarluasan buku-buku yang memuat berbagai macam aspek kebudayaan daerah. Pencetakan naskah yang berjudul, Sistem Pengendalian Sosial di Jawa Tengah, adalah usaha untuk mencapai tujuan di atas.

Tersedianya buku tentang Sistem Pengendalian Sosial di Jawa Tengah, adalah berkat kerjasama yang baik antar berbagai pihak, baik instansional maupun perorangan, seperti: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Pemerintah Daerah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan dan staf Proyek P3NB baik Pusat maupun Daerah, dan para peneliti/penulis itu sendiri.

Kiranya perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam. Akan tetapi, baru pada tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selalu menerima kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan.

Jakarta, November 1992

Pemimpin Proyek Penelitian Pengkajian
dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya



Drs. Suloso
NIP. 130 141 602

**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkannya khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, November 1992

Direktur Jenderal Kebudayaan



Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN ...	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Ruang Lingkup	10
E. Pertanggung Jawaban dan Prosedur Peneliti- an	11
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	17
A. Lokasi	17
B. Penduduk	19
C. Kehidupan Ekonomi	20
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGENDA- LIAN SOSIAL	28
A. Orientasi Normatif Masyarakat Jawa	28
B. Kasus-kasus Yang Muncul Kepermukaan ...	32
BAB IV LEMBAGA SOSIAL DESA DAN PENGEN- DALIAN SOSIAL	38
A. Di Desa Pakelen	38
B. Di Desa Kutobanjarnegara	43

	C. Analisis Hubungan Lembaga Sosial Desa dan Pengendalian Sosial di Masyarakat Jawa Tengah	47
BAB V	PENGENDALIAN SOSIAL DAN ADAT ISTIADAT	49
	A. Adat Istiadat Dalam Masyarakat	49
	B. Pengendalian Sosial dan Adat Istiadat di Desa Pakelen	50
	C. Pengendalian Sosial dan Adat Istiadat di Desa Kutobanjarnegara	53
	D. Analisis Hubungan Adat-Istiadat Dan Pengendalian Sosial di Masyarakat Jawa Tengah	54
BAB VI	KESIMPULAN	55
	A. Rumusan Pokok-pokok Temuan Penelitian ..	55
	B. Kesimpulan	59
	DAFTAR PUSTAKA	61
	Lampiran-lampiran	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sejak dulu manusia telah memikirkan perihal kehidupan sosial dan masyarakat, serta mencoba untuk menganalisisnya. Pemikiran-pemikiran kuno mengenai masyarakat telah banyak dijumpai dalam cerita-cerita rakyat maupun ajaran kepercayaan, yang banyak mengandung keharusan-keharusan atau kepantasan-kepantasan mengenai hubungan antar manusia dalam pergaulan hidup. Para ahli filsafat juga banyak membahas mengenai kehidupan bersama dalam masyarakat, maupun perspektif sejarah perkembangannya (Soeryono Soekanto, 1982 : 29).

Manusia adalah makhluk yang berkebudayaan. Dengan kebudayaan yang dimilikinya, mereka tidak hanya dapat menyesuaikan, tetapi juga merubah lingkungannya demi kelangsungan hidupnya; sebab kebudayaan berisi seperangkat pengetahuan yang pada gilirannya dapat dijadikan alternatif untuk menanggapi lingkungannya, baik fisik maupun sosial.

Kebudayaan sebagaimana dikemukakan Keesing dan Keesing (1971) sebagai sistem ide yang dimiliki bersama, yang secara konseptual menjadi pedoman yang mendasari cara hidup manusia, yang isinya adalah seperangkat ide atau kepercayaan, pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol. Kebudayaan adalah suatu yang dipelajari oleh manusia, bukan sesuatu yang dilakukan atau dibuat oleh manusia. Kebudayaan bukan terdiri dari hal-hal atau kejadian yang dapat diamati, melainkan terdiri

dari sistem ide yang merupakan abstraksi dari hal kejadian yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya (Mulyono Joyomartono, 1986 : 2).

Setiap kebudayaan di dalamnya mencakup berbagai lambang di mana pikiran, gagasan dan citra di transmisikan ke pada pendukung kebudayaan itu. Lambang sebagai unsur kebudayaan harus dipelajari. Lambang tidak timbul dengan sendirinya, maka tetapi diperoleh dari pengalaman sosial. Lambang berkembang dalam kebudayaan oleh karena kegunaannya yang praktis bagi kehidupan bersama. Selain itu lambang juga merupakan sarana sederhana yang mewakili realitas yang cukup rumit dan abstrak, yang sulit dikomunikasikan tanpa adanya lambang itu.

Ada bermacam-macam lambang yang memainkan peranan penting dalam kehidupan setiap masyarakat. Bendera, motto, nyanyian, nyanyian dan patung serta slogan merupakan simbol atau lambang. Kebanyakan lambang berkaitan dengan pengalaman masa lampau suatu kelompok sosial. Lambang itu dihormati dan dipertahankan secara emosional, serta bermanfaat untuk menimbulkan semangat maupun kesetiaan.

Kebudayaan sebagai kompleks nilai dan gagasan utama yang melembaga di dalam masyarakat pada hakekatnya merupakan hasil upaya manusia dalam menanggapi lingkungannya secara aktif. Kebudayaan itu sendiri dari masa ke masa selalu mengalami perubahan. Cepat atau lambat perubahan suatu kebudayaan tergantung kepada kemampuan masyarakat pendukungnya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan serta kemampuan memahami umpan balik yang datang dari luar.

Kecenderungan perubahan mengarah kepada suatu perubahan nilai-nilai dan pola tingkah laku tradisional, ekspansi jaringan-jaringan komunikasi dan pendidikan, perluasan kesetiaan terhadap keluarga, desa dan suku menjadi kesetiaan kepada bangsa dan negara, sekularisasi kehidupan, rasionalisasi struktur kekuasaan, memajukan lahirnya organisasi-organisasi yang menjalankan tugas-tugas spesifik, penggantian ukuran-ukuran kemajuan yang didasarkan kepada turunan dengan prestasi, dan peningkatan di dalam pembagian yang lebih adil dari sumber-sumber material serta simbolik.

Di samping itu perubahan sosial atau katakanlah transformasi mengandalkan suatu proses pengalihan total dari suatu bentuk

sosok baru yang akan mapan. Transformasi diandaikan sebagai tahap akhir dari suatu proses perubahan. Transformasi dapat dibayangkan sebagai suatu proses yang lama bertahap-tahap akan tetapi dapat pula dibayangkan sebagai titik balik yang cepat.

Menurut Max Weber yang membayangkan proses transformasi dan perubahan lewat suatu proses evolusioner dari saling pengaruh—mempengaruhi antar unsur dalam suatu ideal type masyarakat. Maka untuk dapat memahami transformasi masyarakat kita mesti memahaminya lewat ideal type masyarakat yang sengaja diciptakan sebagai suatu model dan paradigma.

Memahami perubahan dan dengan demikian juga transformasi, menurut Weber, adalah memahami motivasi budaya dari masyarakat tersebut. Sedangkan Alvin Toffler dalam *The Three Waves*, pembabakan transformasi tersebut adalah golongan revolusi pertanian, gelombang revolusi Industri dan yang terakhir adalah gelombang masa depan dengan revolusi teknologi canggih serta tinggi di bidang elektronika, komputer serta biologi (Umar Kayam, 1989 : 3).

Masyarakat manusia seluruh dunia sedang mengalami krisis yang mengalami fluktuasi selalu memunculkan masalah yang tipikal. Kerusakan lingkungan hidup meningkat, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin melestari, pengeluaran untuk persenjataan bertambah besar, dan di banyak negara pertambahan penduduk yang cepat berlangsung sehingga menimbulkan tekanan pada sistem yang sudah penuh sesak. Dalam proses semacam ini keabsahan berbagai pranata masyarakat kini sedang dipertanyakan.

Pada akhirnya berbagai konflik akan muncul ke permukaan, dalam masyarakat manapun terus menerus terjadi kesenjangan, ketegangan-ketegangan yang mungkin disebabkan adanya pembentukan kepentingan atau kebutuhan yang berbeda-beda antara individu dengan individu antara kelompok dengan kelompok dan sebagainya. Pertentangan ini mungkin pula di sebabkan karena adanya watak, perangai tingkah laku serta berbagai sebab lainnya. Hal-hal yang demikian tentu saja membutuhkan suatu pengendalian, kalau tidak pasti akan muncul gejala dan malapetaka yang besar. Berbagai macam cara untuk mengendalikan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat atau mencegah terjadinya kemungkinan yang tidak diinginkan, disebut sistem pengendalian sosial atau social Control (Koentjaraningrat, 1977 : 196).

Kondisi masyarakat kita juga sering membuat prihatin bagi mereka yang sedang mengkajinya. Kita seringkali mendengar pernyataan-pernyataan tentang ketidak mampuan kita memahami pola-pola perilaku yang terdapat dalam masyarakat kita. Kita seringkali tidak mengerti mengapa kecenderungan konsumeris makin lama makin mengedepan di kalangan kita. Apakah masyarakat ini telah menjadi masyarakat yang materialistis, yang mulai mengesampingkan hal-hal yang spiritual.

Begitu pula saat sekarang mulai lahir gejala sadisme sebagai misal mayat yang dipotong-potong, gejala sadisme ini mulai mewabah di kota-kota besar, dan ternyata masyarakat mulai apatis terhadap peningkatan gejala sadisme ini. Apakah kita merupakan masyarakat yang kejam yang tidak memiliki lagi sistem pengendalian sosial yang dapat mengendalikan keberadaan masyarakat secara efektif, Kalau pernyataan-pernyataan ini benar, hal ini berarti bahwa kita sebagai suatu totalitas kurang memahami diri kita sendiri, kurang memiliki sistem budaya yang cukup konsisten (Mochtar Buchori, 1982 : 4).

Hal-hal di atas itulah yang mengharuskan kita menelaah permasalahan pengendalian sosial (Social control) secara mendasar. Apakah masyarakat dan kebudayaan akan mengalami disintegrasi sebagai akibat kekecewaan yang dialami manusia. Sebab pada kenyataannya menunjukkan bahwa di satu pihak manusia semakin mampu mengendalikan lingkungan alam, akan tetapi dipihak lain kemampuannya untuk mengendalikan tingkah laku manusia semakin menurun. Cara yang digunakan untuk mengendalikan tingkah laku manusia memang semakin tidak efektif. Padahal apabila manusia ingin bebas dari rasa khawatir dan rasa takut, peranan pengendalian sosial terhadap tingkah laku manusia harus ditingkatkan (Soeryono Soekanto, 1987 : 1).

Pengendalian sosial merupakan suatu kekuatan untuk mengorganisasi tingkah laku sosial budaya, pengendalian sosial mempunyai kekuatan yang membimbing manusia. Di samping itu telah menjadi kenyataan pula bahwa kehidupan suatu masyarakat, senantiasa diatur oleh norma-norma atau kaidah-kaidah yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan fungsinya masing-masing, baik secara pribadi maupun untuk kepentingan kelompok masyarakat serta keseluruhan. Semakin taat dan tertiblah kehidupan mereka dan demikian pula sebaliknya.

Pengendalian sosial oleh Roucek diartikan sebagai proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaedah-kaedah dan nilai-nilai sosial yang berlaku (Soerjono Soekanto, 1982 : 199).

Adapun tujuan akhir dari kontrol sosial tersebut adalah :

1. Kelangsungan hidup/kesatuan kelompok.
2. Proses pembentukan kepribadian sesuai dengan keinginan kelompok.

Jadi pengertian pengendalian sosial dari segi sosiologis adalah amat luas, karena merupakan suatu proses dan sistem yang mungkin bersifat mendidik, mengajak atau mungkin memaksa anggota-anggota masyarakat agar mau mentaati norma-norma dalam masyarakatnya. Dengan demikian ia akan memperkokoh struktur dan menjaga integritas masyarakat tersebut secara keseluruhan. Pada umumnya pengendalian sosial dengan berpedoman pada berbagai norma itu dilaksanakan serta dikembangkan oleh lembaga-lembaga sosial seperti lembaga keluarga, lembaga keagamaan, lembaga pemerintahan dan sebagainya (T. Bachtiar Effendi Panglima Polem, 1977 : 101).

Orientasi-orientasi nilai dalam budaya Jawa ternyata ikut berpengaruh besar dalam proses pengendalian sosial. Budaya Jawa yang selalu didasari oleh falsafah dunia Timur, yang menyatakan bahwa manusia tidak hanya terdiri dari jiwa dan raga, sebab ada komponen lain yang disebut roh atau sukma. Komponen ini dipercaya sebagai percikan dari zat atau Tuhan. Karena itu dia bersifat suci dan Illahiah. Sebagaimana kedudukan Tuhan di dalam tata kosmos (alam semesta) yang mengatur, menontrol dan menyeimbangkan semua gerak komponen-komponen kosmos, roh manusia diharapkan juga menjadi pengatur, pengontrol dan penyeimbang gerak gejolak raga dan jiwa. Bila di dalam diri seseorang ada kecenderungan terlalu memperhatikan satu komponen. misalnya raga saja atau jiwa saja, akan mengakibatkan ketidak seimbangan. Di sinilah diperlukan roh yang diharapkan dapat menyeimbangkan sehingga individu manusia yang bersangkutan tidak memperhatikan tuntutan raga saja atau tuntutan jiwa saja, melainkan keduanya diperhatikan dalam batas-batas keseimbangan dan keharmonisan.

Maka manusia sebagai obyek (dan juga subyek) pengendalian sosial, menurut falsafah dunia Timur tidak hanya sebagai makhluk

individual dan sosial, melainkan juga sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu suatu sikap berperilaku yang bermoral bukan karena demi tereksistensinya kebutuhan sosial saja, namun ada pula pertimbangan rohani – sehingga falsafah dunia Timur itu lebih banyak bersinggungan dengan lingkup religius dan ke-Tuhanan

Konsep harmonisasi atau keseimbangan ini muncul pula dalam sistem kekuasaan raja-raja Jawa, yang merambah pula dalam sistem kontrol masyarakat Jawa. Kedudukan raja inti konsep kekuasaan Jawa, yang sering disebut sebagai doktrin keagung binataraan, merupakan hasil pemahaman magis-religius : kekuasaan merupakan ungkapan kekuatan rohani (gaib) yang ada di belakang kejadian inderawi. Sumbernya adalah dasar, adikodrati, Ilahi, alam semesta. Penguasa, seorang raja berhasil menyedot sebagian dari kekuatan itu. Maka ia diliputi suasana admiduniawi, angker barangkali sakti. Ia melebihi manusia biasa punya keunggulan, karena kekuatan dan kekuasaan alam semesta.

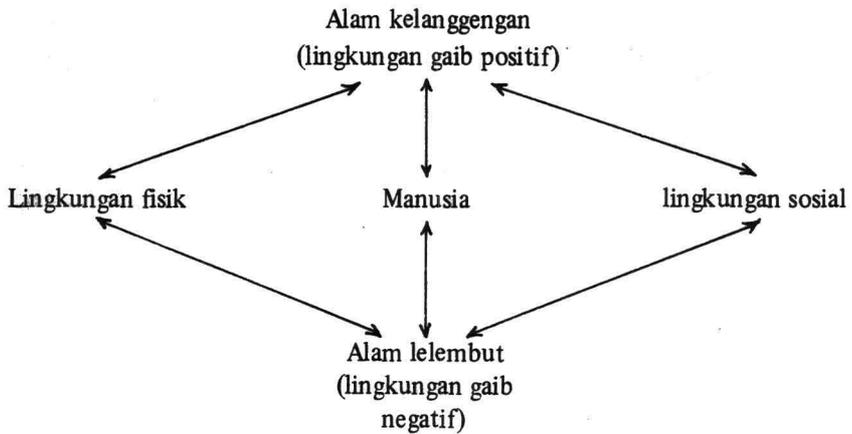
Paham ini mampu pula menyelenggarakan suatu masyarakat yang tata titi tentrem kerta raharja. Maka paham kekuasaan Jawa harus dibaca secara lengkap wenang wisesa ing sanagari, berbudi bawa laksana ambeg paramarta (berwenang tertinggi di seluruh negara meluap budi luhur mulia, adil terhadap semua yang hidup dan penuh kasih). Dua hal ekstrem di padukan, keberhasilan raja diukur sejauh mana ia mampu membuat keseimbangan antara dua kutub ekstrim, kekuasaan dan keadilan, hak dan kewajiban. Sama arti pula dengan pertanyaan sejauh mana raja mampu menyeimbangkan jagad gede (makro kosmos) dan jagad cilik (mikrokosmos). Raja demikian adalah raja yang binatara, yakni raja yang menjalankan kewajiban njaga tata titi tentreming praja, figur seorang raja wicaksana. Hasil bagi rakyat ialah nagari ingkang apanjang apunjung, pasir wukir loh jinawi, gemah ripah, karta tur raharja. Konsepsi kekuasaan Jawa seperti ini secara hierarkhis merambah ke bawah secara birokratis waktu itu. Dan kini terefleksikan pula dalam sistem kekuasaan pemerintahan saat sekarang.

Dalam konsep budaya Jawa, manusia dianggap sebagai replika dari makrokosmos, karena itu tiap individu manusia dianggap sebagai mikrokosmos. Makrokosmos terdiri komponen-komponen yang bersifat materi (alam fisik dengan segala ujud isinya) dan lam non materi atau alam gaib (dengan segala bentuk isinya).

Jalan dan kehidupan makrokosmos itu dikontrol dan diatur oleh Tuhan. Manusia sebagai mikrokosmos juga demikian. Ia terdiri dari raga (materi) jiwa (non materi) dan roh yang semestinya bertindak sebagai pengontrol dan pengendali gerak langkah raga dan jiwa. Walaupun demikian ada perbedaan yang cukup berarti, yaitu bahwa kekuasaan Tuhan dalam tata kosmos begitu mutlak, sedang roh dalam mikrokosmos kadang-kadang tidak terlalu kuat untuk mengarahkan mengatur raga dan jiwa. Bila roh tidak kuasa mengontrol dan mengatur, maka di dalam diri manusia itu terjadi ketidak seimbangan dalam hubungannya dengan lingkungan.

Sesuai dengan pandangan mengenai komponen-komponen makrokosmos, konsep lingkungan yang diutarakan dalam alam ada empat macam. Yang pertama adalah alam kelanggengan yaitu alam tempat Tuhan dan roh-roh yang baik berada. Alam ini adalah alam gaib (ora kasad mata). Kedua adalah alam atau lingkungan sosial. Ini termasuk alam nyata yang kasad mata. Ketiga yang juga termasuk alam nyata adalah lingkungan fisik berupa bumi, langit dan segala isinya kasad mata seperti tanah, gunung, sungai, lautan, langit tumbuh-tumbuhan, binatang dan lain-lain. Yang terakhir adalah lembut. Alam ini adalah alam gaib (ora kasat mata) tetapi sifatnya berlawanan dengan sifat alam kelanggengan. Alam lembut lebih memberi pengertian alam tempat penyebab kejahatan, sesat durhaka dan sebagainya.

Sebagai mikrokosmos, manusia adalah bagian dari alam semesta (makrokosmos). Karena itu tugas manusia di alam hidupnya adalah turut mencipta dan menjaga kehidupan dan keseimbangan makrokosmos, menentang atau menyimpang dari tata kosmos berarti akan menggoncangkan dan merusak keseimbangan kosmos. Ini harus dihindari. Caranya adalah dengan membuat hubungan yang baik, yang selaras dan seimbang dengan keempat alam dan segala isinya. Hal ini dapat tercapai bila dalam diri manusia itu sudah tercipta keseimbangan, visualisasi keseimbangan, hubungan antara manusia dengan komponen-komponen makrokosmos secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut :



Konsep keseimbangan inilah yang menjadi nafas dasar kebudayaan Jawa, dan konsep inilah yang juga menjadi nafas dasar sistem pengendali dalam masyarakat sosial dan kebudayaan Jawa. Nilai, norma dan aturan-aturan untuk bertingkah laku, berdasar dan mengarah untuk terciptanya hubungan-hubungan yang seimbang yang pada akhirnya diharapkan akan dapat menjaga dan melestarikan keseimbangan alam semesta secara keseluruhan (Amin Yitno, 1990 : 7).

Sesuai dengan pembicaraan di atas maka efektivitas sarana pengendalian sosial berbeda sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya. Misalnya, di suatu komunitas desa homogen, gosip merupakan sarana potensial untuk mendorong orang agar mematuhi aturan yang ada, tidak demikian halnya dengan masyarakat kota metropolitan. Para remaja misalnya, lebih khawatir jika diejek kawan sepermainannya daripada menghadapi kritik orang tua, ataupun gurunya.

Efektivitas pengendalian sosial masyarakat Jawa terbentuk berkaitan dengan struktur sosialnya, terutama pada pelapisan-pelapisan sosial yang ada. Menurut konsepsi orang Jawa mengenai pelapisan sosial dalam masyarakatnya, penduduk desa termasuk paling rendah, lapisan "wong cilik" atau orang kecil. Adapun wong cilik di kota-kota adalah mereka yang melakukan pekerjaan tangan atau pertukangan dan mereka yang mengandalkan tenaga kasar untuk bekerja.

Mereka yang menganggap diri mereka termasuk lapisan masyarakat yang lebih tinggi adalah golongan pegawai atau priyayi.

Sebuah lapisan masyarakat Jawa yang lain adalah wong saudagar, atau pedagang-pedagang yang kebanyakan tinggal di kota-kota walaupun ada pula yang di desa. Suatu lapisan yang tertinggi dalam masyarakat Jawa adalah orang bangsawan, yang terutama ada di Yogyakarta dan Surakarta, tetapi sekarang mereka sudah mulai kehilangan kekuasaan dan gengsinya. (Koentjaraningrat, 1984 : 279).

Apabila kita amati bersama, maka di masyarakat Jawa tengah mengalami perkembangan di dalam berprosesnya pengendalian sosial. Karena itu untuk lebih jelas tentang berprosesnya pengendalian sosial dalam masyarakat Jawa, yang didasari oleh adat, hukum, dan norma-norma yang kesemuanya ada dalam kebudayaan Jawa, kiranya jelas perlu diadakan penelitian.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas maka dapatlah diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana wujud pengendalian sosial dalam kaitannya dengan hubungan antar warga, seperti misalnya pujian penghargaan, peringatan, ancaman, kritik, semoooh menertawakan, memperolok, gosip, mengutuk, menakuti, hukuman badan dan lain sebagainya dalam masyarakat Jawa.
2. Bagaimana tanggapan aparat sistem pengendalian sosial terhadap warga yang menjadi sasarannya ?
3. Bagaimana sikap dan pandangan warga terhadap sistem pengendalian sosial yang di dasari kebudayaan Jawa itu ?

C. Tujuan Penelitian

Maksud serta tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara-cara yang digunakan masyarakat Jawa dalam melestarikan lingkungannya, memelihara ketertiban umum, memelihara keberhasilan lingkungan hidup, memelihara keamanan lingkungan, dan memelihara kesatuan dan persatuan warga masyarakat (dalam hal ini Jawa) yang pada gilirannya dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan, terutama dalam menyelaraskan hubungan antar warga di masyarakat Jawa.

2. Mengumpulkan data dan informasi tentang cara-cara yang digunakan oleh masyarakat Jawa dalam menyalurkan kehidupan bersama secara tradisional, yaitu cara-cara yang telah membudaya dalam masyarakat Jawa.
3. Memberikan penjelasan baru tentang model pengendalian sosial yang belum banyak dikupas oleh para ilmuwan (sebagian besar masih terbatas pada teori saja)
4. Memberikan pemahaman tentang sistem pengendalian sosial, yang oleh masyarakat Jawa dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga mereka (terutama generasi mudanya) menjadi sadar untuk melestarikannya.
5. Memberikan masukan pada pemerintah di dalam melakukan pengembangan dan pembinaan pangendalian sosial pada masyarakat Jawa.

D. Ruang Lingkup

Pengendalian sosial terjadi apabila suatu kelompok menentukan tingkah laku kelompok lain, kelompok mengendalikan perilaku anggotanya, atau kalau pribadi-pribadi mempengaruhi tingkah laku pihak lain. Dengan kata lain pengendalian sosial terjadi apabila seseorang diajak atau dipaksa untuk bertingkah laku sesuai dengan keinginan pihak lain, baik apabila hal itu sesuai dengan kehendaknya maupun tidak. (Sorjono Soekanto, 1987 : 2).

Pada bentuk lain pengendalian sosial adalah suatu sarana yang ada dimasyarakat untuk mempengaruhi atau mengontrol semua warganya, melalui proses sosialisasi setiap warganya, melalui proses sosialisasi setiap warga masyarakat akan dituntun ke arah sikap tunduk dan patuh pada norma-norma, nilai-nilai budaya, aturan yang ada atau dikehendaki oleh masyarakat. Dilihat dari kebudayaan, ternyata pengendalian sosial sangat dipengaruhi atau di dasari kebudayaan yang mendukungnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka materi pokok dari penelitian ini dapat dibagi atas :

1. Gambaran umum tentang pengendalian sosial.
2. Pengendalian sosial dalam kaitannya dengan lembaga sosial.
3. Pengendalian sosial dalam kaitannya dengan adat-istiadat.

Ruang lingkup materi penelitian ini akan ditunjang oleh penelitian lapangan tentang sistem pengendalian sosial secara tradisional masyarakat Jawa Tengah.

Penelitian ini dilakukan di dua desa di Kabupaten Banjar Negara Propinsi Jawa Tengah. Dua desa tersebut terletak di kecamatan yang berbeda. Satu desa yaitu Desa Pakelen Kecamatan Madukoro yang boleh dikatakan desa ini belum banyak mendapat pengaruh dari perkembangan teknologi modern karena letaknya cukup jauh dari wilayah perkotaan dan masih sukar dijangkau dengan transportasi atau kendaraan. Satu desa lagi yaitu Desa Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara, suatu desa yang dipandang sudah mendapat pengaruh dari perkembangan teknologi modern karena letaknya yang berada di perkotaan, juga terdapat sarana komunikasi serta transportasi.

E. Pertanggungjawaban dan Prosedur Penelitian

1. Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan mencatat kasus-kasus pengendalian sosial yang terjadi beserta memberlakukannya. Berbagai hal tentang kegiatan dari metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bentuk dan Strategi Penelitian

Bentuk penelitian ini tidak sepenuhnya holistik melainkan dengan pengumpulan data yang terarah. Berdasarkan tujuan dan pertanyaan-pertanyaan peneliti yang diarahkan oleh proposal, maka bentuk penelitian ini adalah penelitian terpancang yang menggunakan studi kasus (Robert K. Yin, 1987 : 27 – 41).

b. Sumber Data

Berbagai sumber data yang telah dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Informan yang terdiri dari para aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, ulama, kader PKK, para orang tua, remaja, dan penduduk pada umumnya.
- 2) Arsip dokumen-dokumen mengenai keadaan desa, dalam hal ini monografi desa.

c. Teknik Pengumpulan Data

Karena pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini, untuk pengumpulan data adalah :

- 1) Wawancara mendalam (indepth interviewing), pertanyaan berbentuk open ended dengan semakin memfokus sehingga informasi yang dapat diperoleh keterangan para informan secara apada adanya, hal ini terutama untuk mengungkap persepsi, pandangan, sikap dan perasaan mereka mengenai sistem pengendalian sosial.
- 2) Observasi langsung, yang dilakukan baik secara informal maupun secara formal, yang mengamati kegiatan penduduk, dan tradisi-tradisi yang mereka lakukan.
- 3) Mencata dokumen, teknik ini dilakukan dengan cara mencatat dokumen atau seluruh arsip tentang desa, termasuk monografi desa.

d. Teknik Cuplikan (sampling).

Cuplikan dalam penelitian ini yang digunakan adalah purposive yaitu dengan memilih informan yang dipandang paling mengetahui masalah yang sedang dikaji, dan dari pendapat para informan ini akan berkembang masalah sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Di samping itu digunakan pula bentuk internal sampling, yaitu sesuai dengan keputusan yang diambil oleh peneliti, sewaktu pikiran umum yang muncul pada masalah yang sedang dipelajari, maka peneliti dapat melakukan pilihan yang tepat - yaitu apa saja yang diperlukan demi tercapainya tujuan dalam penelitian ini. (Sanapiah faisal, 1990 : 56)

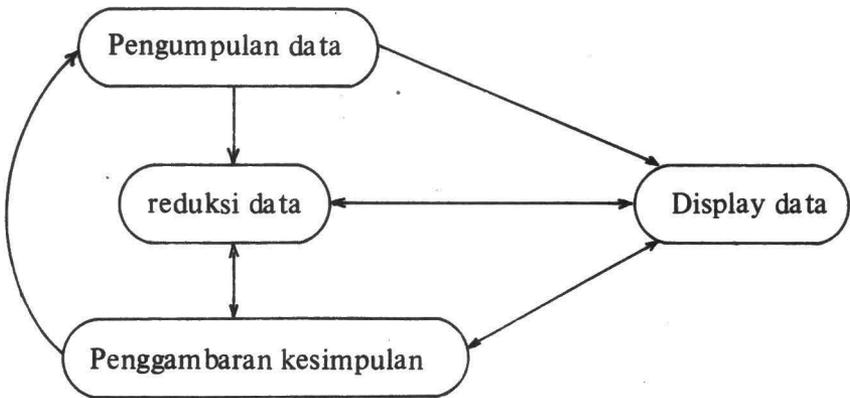
e. Teknik Analisa Data

Unit dari analisis ini adalah dilakukan pada tiap desa. Karena penelitian ini terdiri dari dua desa, maka ada kasus dua desa. Maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis antar kasus (cross site analysis). Studi kasus disini diharapkan berlangsung intensif, mendalam, komprehensif, rinci dan tuntas. Di sini, data kuantitatif bukannya ditolak, melainkan data kuantitatif, dijadikan salah satu rujukan saja dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

Teknik antar kasus disini menggunakan model analisis interaktif yaitu merupakan siklus yang terdiri dari tiga komponen yaitu, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Siklus interaktif yang demikian itu, menunjukkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam, komprehensif dan rinci mengenai sesuatu masalah sehingga dapat melahirkan kesimpulan-kesimpulan induktif. Dalam hubungan ini setiap kesimpulan dari data yang diperoleh, pada tingkat pertama lazimnya dianggap sebagai kesimpulan tentatif yang perlu untuk di cek dan dilacak terus dari berbagai sumber dan informasi lainnya.

Dalam hal ini pengumpulan data, reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan bukanlah sesuatu yang berlangsung secara linear, melainkan merupakan suatu siklus yang interaktif. Gambarannya seperti berikut ini :



(Sanapiah faisal, 1989 : 270)

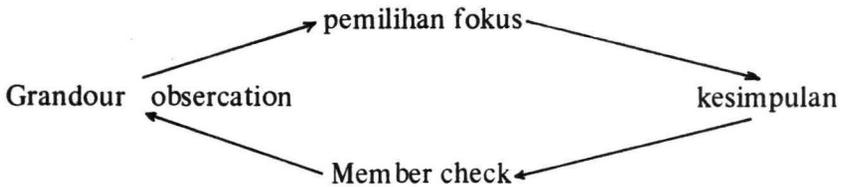
Sedangkan pada validitas data digunakan cara triangulation, di mana dalam penelitian ini digunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama, di samping itu digunakan pula model penelaahan data yang sama dari berbagai teori (theoretical triangulation)

2. Prosedur Penelitian

Proses penelitian ini pada dasarnya berbentuk siklus. Kejadiannya dapat dibedakan menjadi beberapa tahap, pada tahap yang

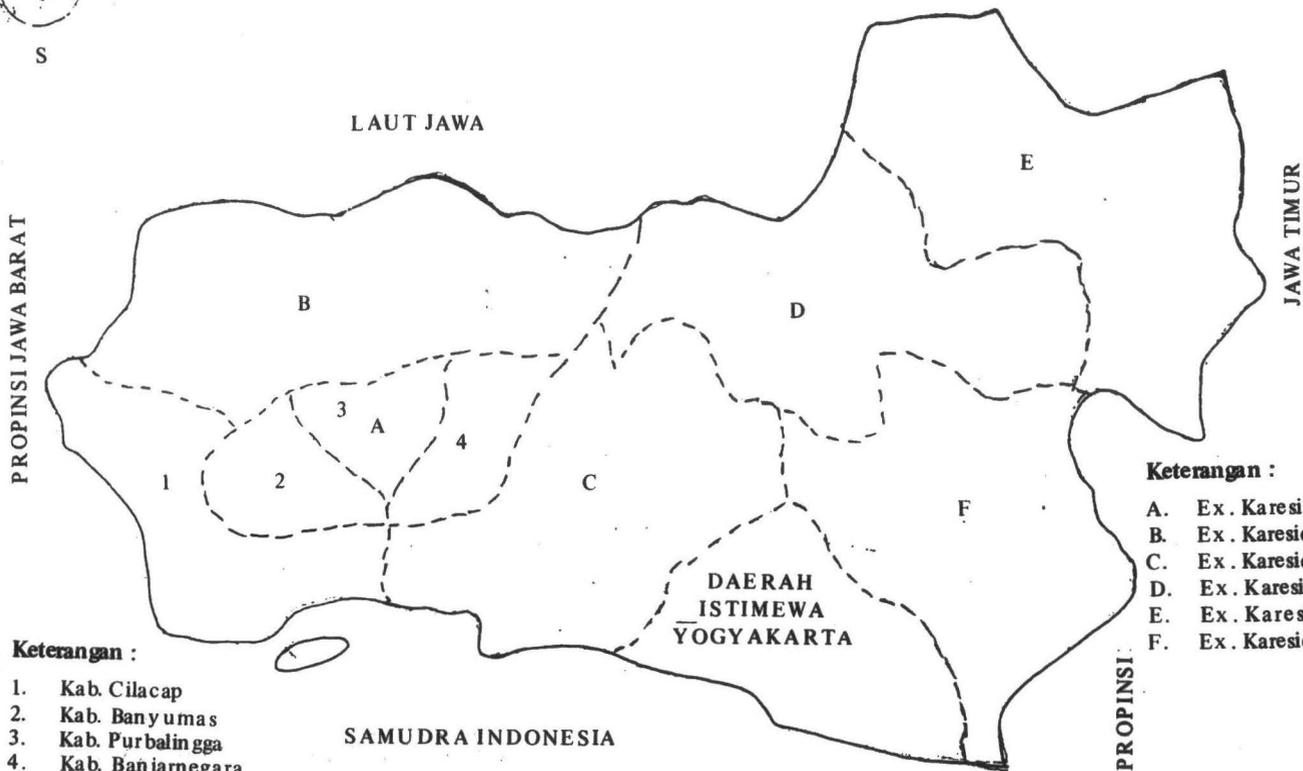
pertama adalah eksplorasi dengan melakukan grandtour observation, kemudian bentuk kegiatan tahap berikutnya adalah pemilihan fokus sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini dengan bentuk strategi etnografi, dan pada tahap yang terakhir yaitu melakukan membercheck.

Sedangkan hal-hal yang bersifat teknis, seperti pada bentuk penelitian dalam umumnya, yaitu memiliki kegiatan melakukan perijinan, pengumpulan data, analisis data dan penyusunan laporan penelitian, kesemua kegiatan ini dilakukan setelah proposal di buat :





PETA PROPINSI JAWA TENGAH



Keterangan :

- A. Ex. Karesidenan Banyumas
- B. Ex. Karesidenan Pekalongan
- C. Ex. Karesidenan Kedu
- D. Ex. Karesidenan Semarang
- E. Ex. Karesidenan Pati
- F. Ex. Karesidenan Surakarta

Keterangan :

- 1. Kab. Cilacap
- 2. Kab. Banyumas
- 3. Kab. Purbalingga
- 4. Kab. Banjarnegara

PETA KABUPATEN BANJARNEGARA

SKALA 1 : 260.000



Kab. Purbalingga

Kab. Pekalongan

Kab. Batang

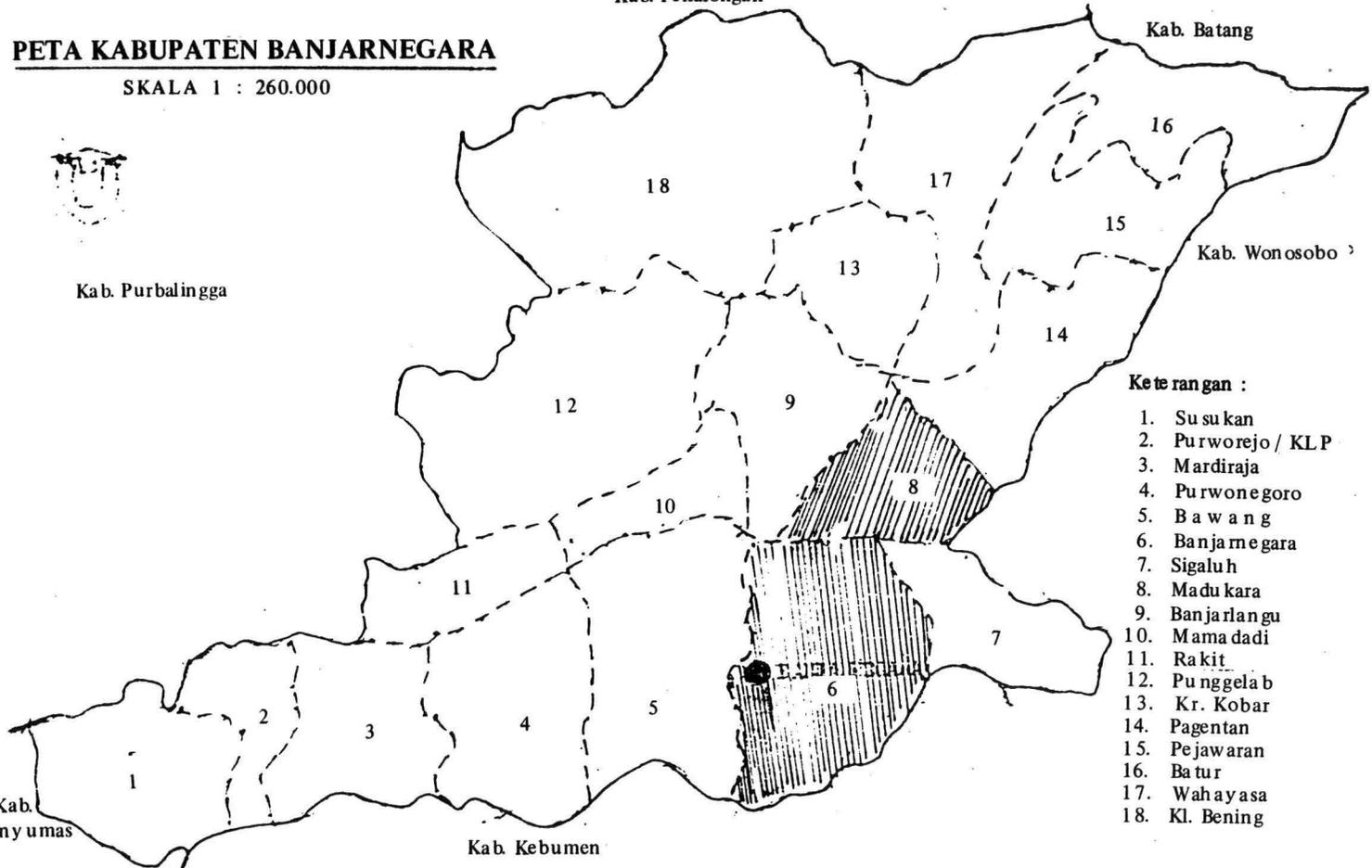
Kab. Wonosobo

Keterangan :

1. Susukan
2. Purworejo / KLP
3. Mardiraja
4. Purwonegoro
5. Bawang
6. Banjarnegara
7. Sigaluh
8. Madukara
9. Banjarnungu
10. Mamedadi
11. Rakit
12. Punggela b
13. Kr. Kobar
14. Pagentan
15. Pejawaran
16. Batun
17. Wahayasa
18. Kl. Bening

Kab.
Banyumas

Kab. Kebumen



BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Lokasi

1. Letak Geografis

Penelitian ini diselenggarakan di daerah propinsi Jawa Tengah. Daerah Jawa Tengah terletak diantara dua bujur Timur $100^{\circ}. 30'$ – $111^{\circ}. 30'$ dan antara kedua lintang Selatan $6^{\circ} 30'$ – $8^{\circ}. 30'$.

Batas sebelah utara adalah laut Jawa, sebelah Barat Propinsi Jawa Barat, sebelah selatan Samudra Indonesia dan sebelah Timur Propinsi Jawa Timur, adapun jarak terjauh dari Timur ke Barat kurang lebih 303 Km, sedangkan jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 226 Km.

Luas Propinsi Jawa Tengah termasuk kepulauan Karimun Jawa, kurang lebih sekitar 34.502 Km^2 . Dengan demikian secara geografis daerah ini tidak begitu luas.

Letak kota-kota yang ada di Jawa Tengah adalah ketinggian 2 m di atas permukaan air laut bagi kota yang terendah dan 756 m adalah kota yang tertinggi.

Desa Pakelen yang dijadikan sample penelitian terletak di Kecamatan Madukoro, Kabupaten Banjarnegara. Desa ini merupakan desa yang paling terpencil dari Kecamatan Madukoro.

Lokasinya yang terpencil menyebabkan transportasi ke arah desa tersebut tidak ada, jalanan desa Pakelen ini cukup licin apalagi bila musim hujan tiba. Mayoritas penduduk desa Pakelen

ini rata-rata menjadi petani salak, karena desa Pakelen ini seluruh ladang dari penduduk ditanami salak, jumlahnya sekitar 125 ribu Ha.

Luas wilayah Desa Pakelen 361.145 Ha, dengan sawah tadah hujan 89.500 Ha, pekarangan penduduk beserta bangunannya sekitar 24.125 Ha, sedangkan kebun dan tegalannya 128.215 Ha. Desa Pakelen memiliki sebuah Balai Desa dan Kantor Balai Desa yang terletak di depan sebuah SD. Di Pakelen ada 3 buah SD dengan jumlah guru 16 orang dan muridnya 178 orang.

2. Keadaan Alam

Keadaan tanah terdiri atas tanah sawah, tanah tegalan, tanah pekarangan, tanah hutan dan tanah pegunungan. Sebagai daerah pegunungan, gunung-gunung di Jawa Tengah banyak yang masih aktif dan tanah pegunungan itu membujur dari Barat ke Timur. Dengan banyaknya gunung yang masih aktif, maka tidak heran bila gunung-gunung di Jawa Tengah sering pula disebut gunung berapi, misalnya gunung Slamet, Sindoro dan Sumbing.

Gunung di Jawa Tengah yang terendah adalah gunung muria yaitu 1800 meter. Karena daerah pegunungan selain membujur dari Barat ke Timur, juga sebagian besar terletak di kawasan Tengah dari Jawa Tengah, maka pegunungan tersebut seperti membelah Jawa Tengah menjadi Jawa Tengah Utara dan Jawa Tengah Selatan. Akibatnya sungai-sungai di Jawa Tengah pada umumnya mengalirnya juga ke Utara atau ke Selatan yang akan bermuara ke laut Jawa bila mengalir ke Utara dan Samudera Indonesia bila mengalir ke Selatan.

Adapun sungai yang mengalir dan bermuara di laut Jawa adalah Sungai Pemali, Gung, Sragi, Loji, Kendal, Bodri, Tuntang, Gede, Banyumudal, Singakarang, Gelis, Serang dan Bengawan Solo.

Sungai-sungai yang bermuara di Samodera Indonesia adalah Sungai Lo, Citandui, Jali, Bagawanta, Lukula, Serayu dan Bengawan Donan. Keadaan tanah seperti yang sudah dijelaskan di depan bahwa tanah di Jawa Tengah di bagi dalam tanah sawah, tanah tegalan, tanah pekarangan, tanah hutan, dan tanah pegunungan, luas seluruhnya diukur dengan hektar kurang lebih ada 3.179.389 Ha.

Tentang tanah sawah terdiri pula atas tanah sawah dengan pengairan teratur dan setengah teratur. Untuk tanah perkebunan di Jawa Tengah pada umumnya hanya ditangani oleh perusahaan negara perkebunan. Perusahaan swasta nasional. Perusahaan swasta asing dan sebagainya kecil sekali oleh perorangan pribumi. Tanah-tanah perkebunan letaknya terserak-serak pada kawasan lereng-lereng pegunungan dan bukit.

Tanah hutan juga terbagi atas hutan jati dan hutan lindung serta ada beberapa kawasan yang dijadikan hutan suaka. Keadaan hutan terasa makin menipis sebagai akibat banyaknya penebangan liar baik untuk pemukiman baru maupun karena dijadikan tanah pertanian.

Adapun temperatur di Jawa Tengah rata-rata adalah 27.3° Celcius dengan curah hujan yang tinggi kurang lebih 22 mm dan di daratan rendah utara dan selatan terdapat 9 mm.

B. Penduduk.

Desa yang merupakan daerah pemukiman yang memiliki tata pemerintahan terkecil, di dalamnya hidup tata kehidupan yaitu penduduk yang berada di kawasan tersebut.

Jumlah penduduk desa Pakelen adalah sebanyak 1188 jiwa yang sebagian besar terdiri dari masyarakat petani.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut :

TABEL 1
KOMPOSISI PENDUDUK
BERDASARKAN PENDIDIKAN DI DESA PAKELLEN

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Yang tidak bersekolah dan yang tidak tamat Sekolah Dasar	691	58,17	
2.	Yang Tamat Sekolah Dasar	445	37,46	
3.	Yang tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	48	4,04	

1	2	3	4	5
4.	Yang Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	3	0,25	
5.	Yang Tamat Perguruan Tinggi	1	0,08	
	Jumlah	1188	100,00	

Sumber :

Berdasarkan data tersebut di atas dinyatakan bahwa tingkat pendidikan penduduk di desa Pakelen masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan yang tidak bersekolah dengan yang bersekolah yakni yang sempat bersekolah lebih sedikit dibanding yang tidak bersekolah.

Desa Kuto Banjarnegara memiliki jumlah penduduk 9450 jiwa. Penduduk desa ini mayoritas bermata pencaharian sebagai pegawai negeri dan yang sisanya adalah pedagang dan petani.

C. Kehidupan Ekonomi.

Jawa Tengah adalah daerah Agraris oleh sebab itu mata pencaharian pokok dari rakyat Jawa Tengah sebagian besar adalah dari hasil pertanian dan perkebunan. Daerah pertanian terbentang dari kawasan dataran rendah bagian utara dan selatan sedangkan daerah perkebunan sebagian besar terletak pada kawasan tengah terutama di lereng-lereng pegunungan. Hasil pertanian utama adalah padi, jagung dan palawija lainnya sedang hasil perkebunan yang menonjol adalah tembakau, kopi, coklat, karet, kelapa, cengkeh, dan buah-buahan.

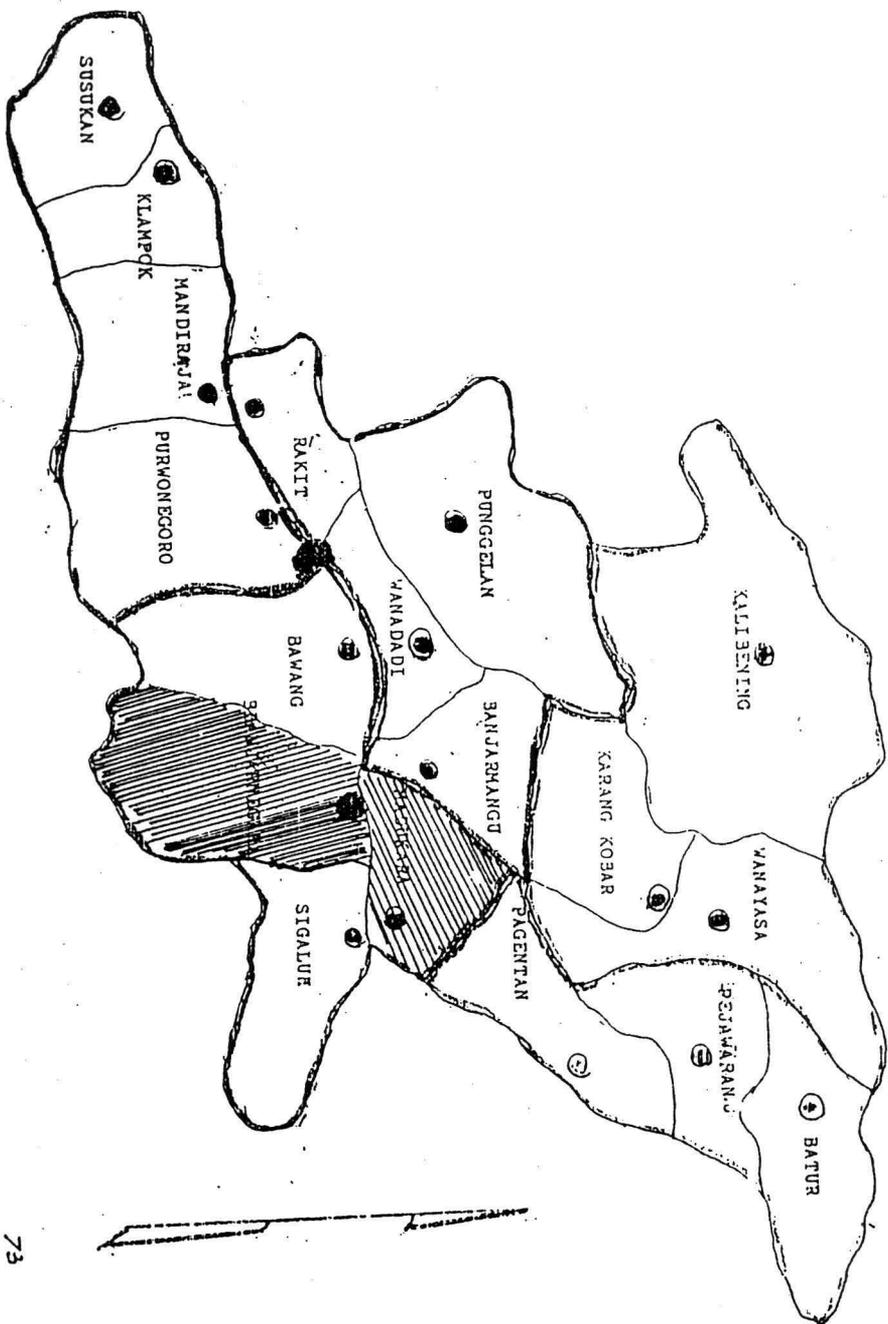
Dunia perdagangan di Jawa Tengah pada umumnya dimiliki oleh golongan cina, oleh sebab itu tidak mengherankan kalau dunia perdagangan di Jawa Tengah menjadi monopoli golongan ini.

Industri di Jawa Tengah yang menonjol adalah rokok kretek di kota Kudus, batik di Surakarta, Pekalongan dan Banyumas, ukiran di Jepara, serta industri kulit di daerah Surakarta. Saat sekarang sudah banyak bermunculan berbagai pabrik yang memproduksi barang baku menjadi barang jadi.

Dengan munculnya pabrik tekstil, pabrik seng, pabrik plastik, kayu lapis, jamur dan lain sebagainya. Dunia perikanan di Jawa Tengah muncul di pantai utara laut Jawa dan sebagian ke-

cil di pantai selatan samudra Indonesia, dalam bidang ini telah banyak dilakukan modernisasi. Di samping itu perikanan di tambak-tambak juga mengalami bimbingan yang efektif.

Di bidang peternakan masih sering digarap secara tradisional yaitu di lingkungan keluarga dan di perusahaan-perusahaan sudah mulai dianggap secara modern. Peternakan itu antara lain : peternakan sapi, kerbau, kambing, ayam, unggas dan lain sebagainya.

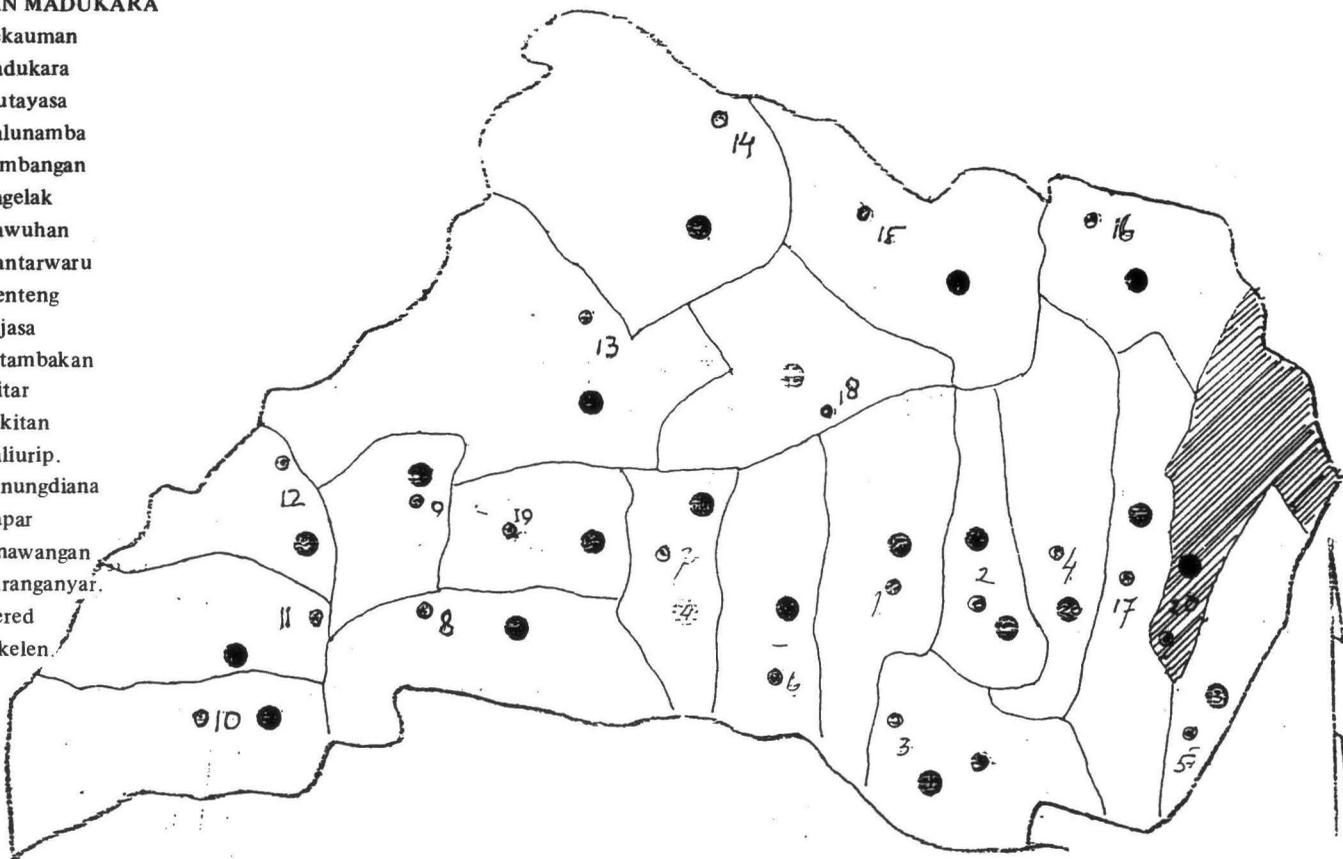


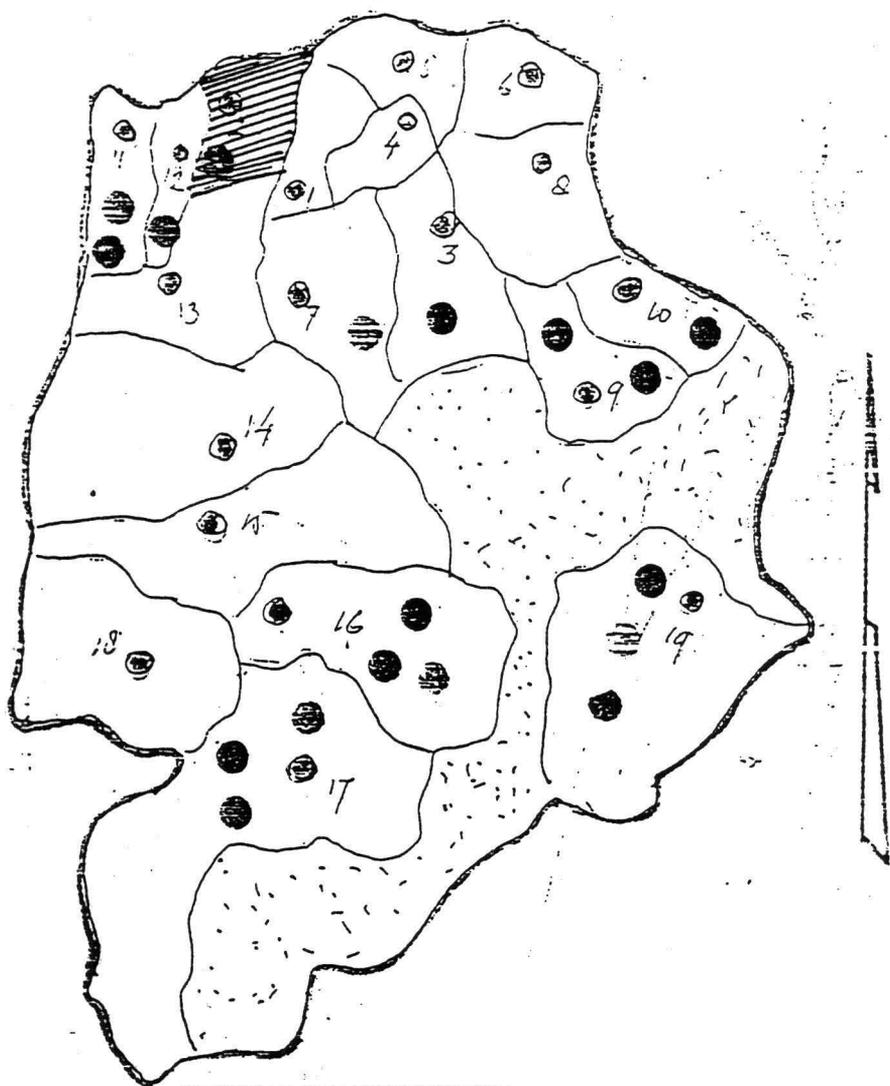
1 : 250.000.

73

KECAMATAN MADUKARA

1. Desa Pekauman
2. Desa Madukara
3. Desa Kutayasa
4. Desa Talunamba
5. Desa Limbangan
6. Desa Pagelak
7. Desa Dawuhan
8. Desa Bantarwaru
9. Desa Kenteng
10. Desa Rajasa
11. Desa Patambakan
12. Desa Blitar
13. Desa Rakitan
14. Desa Kaliurip.
15. Desa gunungdiana
16. Desa clapar
17. Desa Penawangan
18. Desa Karanganyar.
19. Desa Sered
20. Desa Pakelen.





KECAMATAN BANJARNEGARA

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Desa Krandegan | 11. Desa Semampir |
| 2. Desa Kutabajar | 12. Desa Wangon |
| 3. Desa Ampelsari | 13. Desa Karangtengah |
| 4. Desa Semarang | 14. Desa Twelagiri |
| 5. Desa Parakancangah | 15. Desa Pagedongan |
| 6. Desa Sokanandi | 16. Desa Kebutuh Duwur |
| 7. Desa Argasoka | 17. Desa Kebutuh Jurang |
| 8. Desa Sokayasa | 18. Desa Gunung jati |
| 9. Desa Tlagawera | 19. Desa Pasangkalan. |
| 10. Desa Candana | |

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGENDALIAN SOSIAL

A. Orientasi Normatif Masyarakat Jawa

Dalam kerangka umum, orientasi seorang pelaku terdiri dari dua unsur dasar : orientasi motivasional menunjukkan keinginan pelaku untuk memperbesar kepuasan dan menghindari sedapat mungkin kerugian atau rasa sakit. Salah satu aspek dari perhatian ini adalah usaha untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan kepuasan segera dan tujuan jangka panjang. Orientasi nilai menunjukkan standar-standar normatif yang mengendalikan pilihan-pilihan orang perorangan (pilihan sarana tujuan) dan yang menentukan prioritas dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan yang berbeda.

Manusia dalam kehidupannya pasti memiliki orientasi normatif dalam perilakunya. Manusia yang menyimpang dari kaidah-kaidah normatif ini berarti menjerumuskan dirinya dalam inferiorisme, naifisme, serta memasukkan individunya dalam arena kriminal, revans terhadap agama.

Pada kenyataannya suasana kehidupan mengejar pemuasan materi yang keras kurang berhasil dilembutkan oleh kehidupan rohani yang gersang. Itulah yang menimbulkan gejala-gejala kekurangan atau ketidak seimbangan dalam jiwa seseorang. Jiwa yang kurang atau tidak seimbang mudah goyah atau menjadi rapuh dalam menghadapi tekanan atau persoalan-persoalan kehidupan. Ia mudah mengundahg keresahan, kegelisahan atau frustrasi.

Dari situ akan lahir berbagai corak tingkah laku yang aneh-aneh. Ada yang menjadi manusia kesepian ini kebanyakan dari mereka yang mengalami krisis kejiwaan, serta kehilangan pegangan dan arti dirinya sebagai manusia. Manusia-manusia seperti yang sering disebut dengan istilah *the lonely crowd* sering (kalaulah tidak selalu) merasa dirinya terlepas sendirian di atas dunia yang fana ini tanpa mengetahui ke mana harus pergi dan mengadu buat mengisi kekosongan rohaninya yang mencekam.

Mungkin itu semua menjadi pertanda mulai kaburnya batas-batas kebenaran dan ketidakbenaran. Orang sering tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Masyarakat bagai kehilangan pegangan nilai yang disepakati untuk ditaati bersama guna menjaga ketertiban dan rasa tenang.

Sesungguhnya dalam kebudayaan Jawa ada konsep-konsep yang dapat dijadikan sebagai orientasi nilai, dalam pengendalian sosial, yaitu etika yang mengedepankan tentang makna "rukun" dan "hormat". Kedua konsep itu lahir karena adanya tertib kosmis. Ia dipakai untuk menjadi keseimbangan antara alam dan ilahi. Dalam rangkaian itu hidup orang Jawa diatur dalam jenjang hierarki. Rukun akan tercipta kalau masyarakat tahu dan sadar menempatkan dirinya pada jenjang-jenjang itu. Dan orang Jawa sering menyatakannya dengan sebutan "tahu diri".

Kedua konsep itu berawal dari suatu kesadaran orang Jawa untuk hidup secara bersama. Dari kesadaran itu lahir kemampuan "tanggap". Tanggap melahirkan "roso". Dari roso barulah muncul rukun dan hormat itu. Tanggap ada hubungannya dengan stabilitas material batin. Dan di dalam unsur rukun dan hormat itu sebetulnya termasuk juga konsep sabar dan tawakal. Karenanya masyarakat Jawa menginginkan keseimbangan dan keselarasan.

Orang Jawa juga selalu menghindari konflik, sebab hal itu hanya akan menimbulkan tidak laras. Untuk menghindarinya mereka mengkaitkan dengan stratifikasi. Misalnya ada bahasa kromo, kromo inggil dan seterusnya. Hubungan jenjang ini harus dijaga. Ada mekanismenya agar tidak meleset, seperti sungkan atau isin. Ada juga etok-etok suatu cara agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Dengan begitu hubungan bisa selaras dan harmonis.

Untuk tahu dengan pasti jenjang-jenjang itu, seorang Jawa harus "ngerti", dalam hal ini berbeda dengan Barat. Ngerti untuk orang Jawa bukan mengolah bakat, bakat jadi baik agar dapat menguasai dunia, karena manungso sadarmo mung nglakoni,

dunia sudah ada yang mengatur dan ada tempatnya masing-masing. Tetapi mendorong pengertian itu menjadi makin matang, makin waskito, dan makin pintar. Setelah ngertu baru punya roso.

Pada konsep "tanggap" itu lahir secara ilmiah. Misalnya kalau ada petir, bersama-sama ingin menyelamatkan diri—dalam rangka itulah dibuat selamatan. Masuknya Hindu ke Jawa mendukung berseminya tanggap ini. Ia dikaitkan dengan dewa-dewa, ia kemudian dikaitkan pula dengan ide kesempurnaannya Hindu.

Masuknya Islam juga membawa persemaian bagi konsep-konsep seperti Yariat, tariat atau marifat, itu merupakan tanggap yang lebih halus lagi. Ketika tumbuh kerajaan di Jawa mulailah dikenal jenjang hierarki. Raja-raja dianggap memperoleh kekuasaan dari dewa-dewa. Raja tidak mungkin berbuat jahat, karena kalau itu dilakukannya, maka bahunya dari atas akan menipis. Konsep hormat yang lahir dari jenjang itu kemudian menjalar horisontal ke dalam keluarga-keluarga. Seseorang yang usianya relatif tua, lalu dinilai semakin tinggi daya tanggapnya, dengan asumsi dia banyak pengalaman.

Pandangan dunia orang Jawa, ternyata tempat begitu penting. Untuk menjawab mengapa tempat begitu penting, kita perlu memperhatikan pandangan dunia orang Jawa. Dengan pandangan dunia kami maksud pandangan menyeluruh tentang hakekat dan struktur alam semesta, tentang realitas sebagai keseluruhan. Data-data tentang pandangan dunia orang Jawa sebagian besar telah diuraikan oleh Geertz membedakan antara antara kaum abangan, santri dan kaum priyayi

Ciri utama pandangan dunia kaum abangan adalah bahwa dunia dihayati sebagai penuh dengan roh-roh atau bangsa halus. Itulah cara konkret petani Jawa menghayati ke ilahian semesta yang melimpah ke dalam dunia lahir. Melalui berbagai upacara kecil, sesajen, selamatan dan dengan perantaraan seorang dukun, petani berusaha mendapat bantuan dari bangsa halus itu, atau sekurang-kurangnya jangan sampai mereka mau mengganggu.

Dalam dunia semacam ini sikap yang tepat bukanlah sikap yang disukai orang Barat, yaitu sikap mencari kebenaran. Mencari kebenaran hanya masuk akal apabila kekuatan-kekuatan dunia adalah terbatas, pasti, obyektif. Tetapi dalam pandangan orang Jawa kekuatan-kekuatan alam tidak mencerminkan suatu hukum obyektif yang harus diketahui dan terus dapat dipakai, melainkan

kekuatan-kekuatan alam yang mengungkapkan kemauan dan perasaan dari roh-roh itu, jadi tidak pasti, dapat berubah-ubah. Tetapi karena roh-roh itu tidak kelihatan, kesenangan dan kemauan mereka hanya bisa diraba. Manusia itu seperti seseorang yang berada dalam sebuah ruang gelap gulita yang penuh dengan kursi-kursi dan meja-meja, yang mencari pintu keluar, ia mesti bergerak dengan sangat hati-hati dan pelan-pelan jangan sampai ia menyinggung roh-roh itu. Dengan lain kata, gerak-geriknya di dunia ini mesti sesuai dengan roh-roh itu. Dan sesuai berarti menduduki tempat yang tepat.

Sikap yang paling tepat dalam dunia orang Jawa itu sikap mencari tempat yang tepat. Tentu saja tempat yang tepat dinilai sangat tinggi. Menemukan tempatnya yang tepat di dalam kosmos berarti boleh merasa aman dari serangan kekuatan-kekuatan yang tidak dapat diperhitungkan. Orang akan berusaha untuk tetap pada tempat itu, ia akan berpegang teguh pada tradisi karena tradisi mencerminkan pengalaman kolektif kelompoknya tentang mana yang tepat, ia akan menolak sedapat mungkin segala perubahan dan pembaruan karena itu akan berarti bahwa ia harus kembali ke alam ketidak pastian, bahwa ia harus meninggalkan tempatnya.

Maka menghormati orang sesuai dengan tempatnya itu adalah sesuatu yang wajar baginya. Tampaklah bahwa faham hormat akhirnya berakar pada naluri yang paling pokok yaitu naluri untuk mempertahankan diri.

Pada golongan priyayi pandangan dunia yang sama mendapat bentuk yang lebih halus dan mapan. Roh-roh itu mundur kebelakang dan diganti oleh faham bahwa dunia lahiriah itu dalam pelbagai derajat mewarnai percikan zat ilahi.

Di dalam wirid Hidayat Jati karangan R. Ng Ronggo warsito misalnya diutarakan bagaimana manusia yang ditampung oleh yang Ilahi sekaligus menampung yang Ilahi. Penghayatan itu merupakan salah satu faham dasar gerakan-gerakan kebatinan pula.

Pada latar belakang itu pun kategori tempat mesti menjadi kategori fundamental. Manusia itu bernilai sejauh ia mewedahi yang Ilahi, dan itu terungkap dalam kedudukannya. Lepas dari kedudukan itu ia kehilangan artinya. Maka ia mesti mencari tempatnya dan menghormati setiap orang sesuai dengan pangkatnya. (Franz Magnis Suseno, 1983 : 42).

B. Kasus-kasus Yang Muncul Kepermukaan.

Bahwa keadaan alam dan kehidupan manusia selalu mengalami perubahan dan tidak ada satupun yang bersifat abadi, Kecuali Tuhan Yang Maha Esa dan keseluruhan alam itu sendiri, sebenarnya sudah banyak diketahui orang semua agama utama mengatakan itu, demikian pula berbagai aliran falsafah, termasuk pandangan falsafah Jawa.

Meskipun begitu, banyak orang yang kurang dapat menyadari terjadinya perubahan dan baru kalau perubahan itu, sudah berjalan cukup lanjut, orang-orang itu secara terlambat menginsyafinya. Hal ini biasanya disebabkan manusia cenderung berpegang secara kuat pada apa yang sudah dialami dan diketahuinya, atau bersifat konservatif. Terlebih lagi kalau dalam kondisi lama dia berada dalam keadaan yang baik dan tidak mau meninggalkan keadaan yang sudah baik itu.

Sebab itu biasanya manusia atau kelompok manusia yang sedang dalam keadaan kurang memuaskan, lebih peka terhadap perubahan atau bahkan mengambil tindakan untuk mempercepat terjadinya perubahan. Akan tetapi, perlu pula dikatakan bahwa usaha memaksakan perubahan tidak selalu bermanfaat, sebab tidak jarang, segala sesuatu mempunyai timingnya sendiri. Dalam pandangan Jawa dikatakan bahwa manusia tidak dapat ngege mangsa.

Pada intinya segala sesuatu ada akhirnya untuk memberi tempat bagi sesuatu yang baru. Itu kita lihat pada tumbuh-tumbuhan pada kehidupan hewan, juga pada kehidupan manusia. Dalam kehidupan umat manusia pun terjadi siklus perubahan yang tidak ditolah atau dibendung.

Meskipun pada waktu ini dianggap suatu yang kurang sopan atau kurang berpandangan luas, apabila kita bicara dalam kerangka perbedaan rasial, namun dalam kenyataan hidup umat manusia tidak dapat ditolak, bahwa perbedaan rasial mempunyai makna yang cukup berarti.

Walaupun orang sering berkata, bahwa menggunakan ukuran rasial adalah bersifat primordial, namun dalam kenyataan sekarang di negara dan masyarakat yang dianggap paling maju di dunia, pergaulan dan pandangan masih amat diwarnai oleh faktor rasial, termasuk di kalangan yang paling terpelajar. Sebab, mungkin sekali itu adalah untuk satu pertahanan orang untuk menjamin preservasi kelompoknya dan diri pribadinya.

Di bidang pemerintahan seringkali terjadi bahwa penanganan konflik kepentingan harus dilakukan demokratis dan berdasarkan hukum, tidak dengah menggunakan pendekatan kekuasaan. Jika hal ini tidak diindahkan maka rasa ikut memiliki (melu handar-beni) dan ikut bertanggung Jawab (melu hangrungkepi) terhadap pembangunan akan semakin pudar dan pada gilirannya hanya akan melemahkan partisipasi rakyat dalam gerak pembangunan.

Di samping itu proses perubahan struktural menuju masyarakat industrial berlangsung di dalam konteks pertentangan nilai. Di satu pihak, proses tersebut mensyaratkan berlakunya nilai-nilai yang mendominasi interaksi di dalam mekanisme pasar, seperti orientasi kepentingan kompetisi, dan efisiensi akan tetapi di lain pihak GBHN menekankan pada nilai-nilai simbolik seperti asas kekeluargaan dan pemerataan.

Kondisi-kondisi perubahan masyarakat yang demikian pesat itu membuat masyarakat semakin tidak dapat melakukan pengendalian sosial secara efektif.

Akhirnya perlu sekali ide-ide yang komplit demi tercapainya bentuk-bentuk pengendalian sosial itu. Seperti yang muncul di lapangan yaitu upaya penuntasan terus menerus terhadap kasus kumpul kebo.

Yaitu diadakannya perkawinan secara massal di kabupaten Semarang, diawali dengan doa, Allahumma, ya Allah berkaitan kiranya kedua mempelai ini dengan kehidupannya yang penuh dengan kebahagiaan. Allahuma, ya Allah anugerahilah ke dua mempelai ini dengan keturunan yang saleh, yang berbakti ke pada Mu, dan taat terhadap ke dua orang tuanya serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Sederetan kalimat doa sesudah akad nikah di atas, tentunya tidak sekedar ucapan yang terlontar dari bibir saja. Namun maknanya lebih dalam. Baik oleh sang penghulu yang mengucapkannya maupun bagi yang mendapat restu.

Khususnya para insan kumpul kebo yang berjumlah 9 pasang. Mereka memang berhasil digiring ke jalan yang benar dan dikawinkan secara massal di gedung DPRD Ungaran Kabupaten Semarang, beberapa tahun yang lalu. Dari peserta perkawinan ternyata secara umum mereka berterima kasih kepada pemerintah yang telah mengadakan perkawinan massal. Walaupun begitu ada pula yang amat malu dan pakewuh karena dilihat oleh orang banyak, apalagi mendapat julukan kawin kumpul kebo.

Pada dasarnya mahligai perkawinan merupakan bentuk pengendalian sosial yang cukup ampuh untuk membuat orang memiliki etika dan moral. Kehadiran rumah tangga atau pernikahan merupakan tugas yang amat suci dan agung di mata Allah. Pada dasarnya, pernikahan bisa menjunjung dan melestarikan sifat kemulyaan martabat manusia. Kecuali itu juga dapat menghilangkan rasa purbasangka. Pernikahan menurut orang Jawa juga merupakan ibadah, maka seorang muslim kalau sudah mampu harus cepat melakukan pernikahan.

Di samping itu, seks itu sakral. Itulah sebabnya aktivitas seks, menurut ajaran agama apapun, baru boleh dilaksanakan setelah ada ikatan perkawinan yang sah, dan perkawinan itu suci. Bukti dari sebuah kesucian adalah campur tangannya tokoh agama, dalam memberikan restu, mensyahkan perkawinan, atau perkataan perkawinan bagaimanapun juga ikatan suci yang disahkan oleh hukum Tuhan dan telah menjadi suatu kebudayaan.

Namun dengan bergesernya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, aktivitas seks tidak lagi dinilai sesuatu yang sakral. Lembaga perkawinan sebagai wadah dari pengendalian sosial, kadangkala sudah mulai diabaikan sosial, kadangkala sudah mulai diabaikan keberadaannya. Sehingga terjadilah fenomena sosial kumpul kebo.

Perkawinan jaman sekarang agaknya. Sudah berbeda dengan jamannya Siti Nurbaya dahulu. Perkawinan biasanya bermula dari adanya benih cinta. Setelah melalui proses pacaran terlebih dahulu. Karena pacaran merupakan salah satu manifestasi pemupukan cinta. Sekaligus untuk saling menyelami kepribadian masing-masing. Di samping itu proses pacaran sebagai masa transisi untuk menyesuaikan diri dengan pendamping hidupnya. Tanpa adanya rasa cinta tak mungkin terjadi proses pacaran.

Konflik yang muncul dalam awal perkawinan ini biasanya terjadi karena tidak setujunya pihak ketiga yaitu orang tua. Hal ini sering mengakibatkan perkawinan yang gagal. Walaupun keduanya saling mencintai bahkan cinta itu telah berurat berakar. Kendala ini munculnya dari pihak orang tua. Atau dari satu pihak yang tidak menyetujui hubungan anaknya dengan kekasihnya. Tetapi seringkali mereka tidak lagi memandang orang tua dan nekat dengan cara kawin lari atau bahkan dengan melakukan kumpul kebo. Lantaran kumpul kebo dianggap sebagai mani-

festasi dari perasaan cinta. Kumpul kebo jelas-jelas bertentangan dengan konsep budaya Jawa dan melanggar peraturan agama.

Aktivitas seks dilakukan tanpa ada paksaan. Tetapi nilai kesucian hubungan seks sudah tidak ada lagi. Aktivitas seks hanya di dasarkan pada perasaan suka sama suka, dan perasaan suka sama suka atau saling membutuhkan itu terus terjelma dalam bentuk hubungan seksual yang terus menerus sampai mereka bosan.

Terjadinya konflik dalam masa menjelang perkawinan antar orang tua dengan anak adalah salah satu contoh telah bergesernya konsep "hormat" dalam budaya Jawa. Dalam etika Jawa sebagai salah satu norma dasarnya terdapat keyakinan bahwa apa saja yang ada harus dihormati karena percikan zar Ilahi, oleh karena itu bernilai dan pantas untuk dihormati.

Jaman dulu perkawinan yang selalu dijodohkan dalam masyarakat Jawa tidak terjadi konflik karena sikap hormat kepada orang tua, sehingga anak yang dijodohkan itu melaksanakan perkawinan yang dijodohkan itu dengan rela dan ikhlas menerima karena hormat kepada orang tua.

Dalam hal ini kesepakatanlah yang mendasari pemikiran antara orang tua dengan orang tua (besanan). Maka kesepakatan pihak orang tua yang mendominasi terjadinya sebuah ikatan perkawinan. Dengan ikatan perkawinan tersebut masing-masing pihak dapat melakukan aktivitas seks.

Mungkin mula-mula tanpa ada rasa cinta namun lama-kelamaan tumbuh benih-benih cinta. Dalam masyarakat Jawa ini yang dinamakan dengan araning trisno jalaran soko kulino.

Perkawinan semacam ini, bukan berarti tidak akan membuahkan kebahagiaan. Karena tujuan perkawinan disini tidak semata-mata mencari kepuasan untuk aktivitas seks. Melainkan hidup dalam kebersamaan.

Perkembangan teknologi komunikasi dan media masa dewasa ini telah mengubah tatanilai dan norma dalam kehidupan masyarakat. Salah satu kenyataan yang paling menonjol adalah semakin banyaknya wanita yang bekerja di luar rumah, baik itu di bidang swasta ataupun di instansi pemerintah.

Namun sudah memiliki posisi sosial sama seperti kaum pria, secara kodrati wanita tetaplah wanita, lengkap dengan kelebihan-nya. Ia tetap merupakan daya tarik alamiah bagi pria, terutama

dalam konteks hubungan sosial. Inilah salah satu sebab timbulnya risiko terhadap gangguan atau godaan seksual.

Gangguan ini bukan berupa keluhan seksual seperti frigiditas atau semacamnya, tetapi godaan yang datang dari pria atasannya sebagai misal atau pria rekan sekerja lainnya ke arah hubungan badani.

Memang gangguan ini bukanlah monopoli wanita pekerja saja. Ibu-ibu rumah tangga biasa, mahasiswi, ataupun wanita yang melulu diam dirumah pun bisa dihampiri aib moral ini. Namun wanita pekerja jelas memiliki risiko lebih tinggi karena mereka hidup di dalam pergaulan lebih luas serta bertemu dengan bermacam tipe pria. Pergaulan yang luas dengan beragam kepribadian pria memberi peluang dan kesempatan membandingkan sang suami dengan pria lain dilingkungannya.

Dari berbagai kasus yang muncul di atas maka dapatlah dikatakan bahwa konsep-konsep kebudayaan Jawa yang dapat mengendalikan fenomena sosial memang perlu diperhatikan, yaitu tahu menempatkan diri, tahu unggah-ungguh dan mengenal konsep yang disebut dengan isin. Orang Jawa selalu mengajar anaknya untuk merasa malu pada keadaan-keadaan tertentu yang merupakan suatu konsep yang jelas untuk mengukur suatu sikap orang Jawa dalam berhubungan dengan sesama makhluk hidup.

Seandainya orang-orang modern sekarang ini masih merasa isin atau malu baik itu terhadap dirinya sendiri atau terhadap Tuhan maka bentuk-bentuk penyimpangan-penyimpangan itu agak terkendalikan dan berjalan dengan efektif.

Sedangkan pengendalian sosial yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh hukum sering pula memasukkan konsep-konsep kebudayaan setempat di mana kontrol pemerintah itu berjalan, dan kontrol sosial itu diharapkan berjalan dengan efektif.

Kontrol sosial dalam suatu pemerintahan sudah barang tentu terikat oleh filsafat negara masing-masing. Di bidang kekuasaan, pemerintahan Jawa pada masa lalu yaitu, hubungan antara faham hormat dan pandangan dunia orang Jawa kelihatan dengan jelas faham Jawa tradisional tentang kekuasaan.

Menurut faham ini kekuasaan politik pada hakekatnya adalah zat Ilahi sendiri. Seorang raja akan semakin berkuasa, semakin ia berhasil untuk memusatkan zat itu dalam dirinya sendiri. Sebagaimana sebuah lensa memusatkan cahaya matahari untuk memancar-

kannya ke bawah, begitu kekuasaan yang berpusat pada raja, menyinari dan meresap ke bawah : orang-orang keraton dulu, kemudian para pegawai raja, akhirnya sampai kedesa-desa yang paling jauh. Sinar kekuasaan raja inilah yang membuat tanah menjadi subur dan kehidupan rakyat menjadi ayem tentrem kerta raharja.

Bukanlah kekayaan, kesuburan tanah atau kemampuan tentaranya yang membuat raja itu berkuasa, melainkan sebaliknya; karena raja itu berkuasa, ia menjadi kaya, tanahnya subur dan tentaranya ampuh tidak ada yang mengalahkan.

Tugas raja yang terpenting, baik supaya ia dapat mempertahankan kekuasaannya maupun agar masyarakat tetap tentram adil dan makmur keadaannya ialah mengusahakan agar ia mewedahi daya kosmis itu sepenuh-penuhnya. Fahaman kekuasaan Jawa memperlihatkan logika fahaman hormat terhadap atasannya, karena atasan adalah penyalur zat Ilahi. Maka orang harus menghormatinya dan mencari pengayomannya. Fahaman kekuasaan Jawa mementingkan anti konflik, dan cenderung seluruh masalah diselesaikan dengan musyawarah.

Keadaan yang menyatakan arah pada harmonisasi ini juga nampak pada etika Jawa yang terpendam suatu sikap hormat terhadap siapa saja. Yaitu misalnya penghargaan besar terhadap kesamaan sosial di desa. Keengganan orang Jawa untuk mencampuri urusan tetangga serta konsepsi orang-orang desa tentang dirinya sendiri sebagai orang yang suka menerima tamu, saling membantu, saling berdamai dan rukun tanpa perbedaan-perbedaan dalam kedudukan sosial dan kekuatan ekonomi kiranya hal-hal seperti inilah yang sangat berperan dalam kehidupan pengendalian sosial masyarakat Jawa.

BAB IV

LEMBAGA SOSIAL DESA DAN PENGENDALIAN SOSIAL

A. Di Desa Pakelen

Pakelen, desa yang menjadi ajang telaahan ini terletak di dalam kawasan budaya Jawa bagian tengah, tetapi letaknya cukup jauh dari jangkauan pengaruh keraton Surakarta dan Yogyakarta.

Mengenai sistem pengendalian sosial di desa Pakelen ditandai oleh konflik-konflik laten sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan kepentingan mereka. Hal ini misalnya dapat dilihat dari jawaban Bapak Witaso (Nama tersamar), ketika ditanyakan bagaimana reaksi masyarakat ketika untuk pertama kalinya ia menjadi pengamat aliran kepercayaan, sementara mayoritas dari masyarakat desa Pakelen adalah Islam. Selanjutnya diceritakan bahwa reaksi masyarakat pada waktu itu adalah keras sekali.

Semenjak saat itu muncul berbagai front yang memihak bapak Witaso dan yang memihak para ulama. Reaksi keras ini terutama muncul dari para tokoh agama masyarakat desa Pakelen, mereka dengan gigihnya mencoba mempengaruhi masyarakat desa untuk tidak bekerjasama dengan Bapak Witaso.

Di balik itu Bapak Witaso tetap bertahan pada pendiriannya, karena dia mempunyai suatu keyakinan bahwa pada akhirnya masyarakat akan dapat menerima kenyataan tersebut dan kalau mereka sudah sampai pada tingkat kejenuhan pasti hubungan akan menjadi harmonis kembali.

Fenomena diatas jika dikaji lebih mendalam, maka terlihat bahwa keberanian Bapak Witaso untuk bertahan pada waktu itu karena dia melihat pertentangan masyarakat desa terhadapnya karena rasa enggan bertahap para tokoh agama Desa Pakelen. Hal ini bisa diterima karena dari beberapa jawaban yang diberikan oleh warga masyarakat mereka umumnya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Bapak Witaso itu merupakan hak pribadi.

Mereka tidak peduli sepanjang hal tersebut mengancam kepentingan-kepentingan utama mereka, yaitu penemuan kebutuhan hidup sehari-hari. Keadaan ini apabila dianalisa lebih lanjut menunjukkan masyarakat desa Pakelen memiliki toleransi yang tinggi sesuai dengan kebudayaan Jawa. Disamping itu masih adanya nilai-nilai kerukunan di masyarakat Pakelen.

Kaidah kerukunan menyatakan bahwa buat orang Jawa kerukunan merupakan nilai sosial yang utama. Tetapi menempatkan sebagai cita-cita tertinggi hidup bersama masyarakat dengan sendirinya mesti merelatifkan nilai dipertahankannya hak-hak individu. Karena kerukunan berarti semua pihak harus mau berdamai, bahwa tidak ada pihak yang mengajukan suatu tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawarkan.

Justru karena orang Jawa pertama-tama mau mencegah munculnya pertentangan-pertentangan secara terbuka, ia tidak melihat suatu nilai mutlak dalam dipertahankannya hak-hak tiap-tiap individu. Hak-hak itu dalam pandangan Jawa tidak boleh ditekan sampai menimbulkan ketegangan yang mengancam kerukunan. Maka hak-hak itu tidak bersifat mutlak, hak-hak itu dalam pandangan Jawa tidak boleh ditekan sampai menimbulkan ketegangan yang mengancam kerukunan. Maka hak-hak itu bersifat mutlak. Karena kerukunan dimutlakkan, maka dalam pengendalian *sosial* konsep hormat terhadap hak-hak tiap-tiap individu hanya bersifat relatif.

Di samping itu pada masyarakat desa Pekelen mulai ada pemahaman, bahwa ada hal-hal yang sifatnya kebersamaan dan ada hal-hal yang harus dilakukan oleh individu. Akan tetapi hal semacam ini seringkali masih terbatas pada pemikiran saja, belum mereka wujudkan dalam tindakan-tindakan yang nyata. Ini dapat terjadi karena tingkat pendidikan pada umumnya yang menyebabkan kurang beraninya mereka mengadakan perubahan-perubahan terutama pada norma-norma yang ada di desa Pakelen.

Seperti kita ketahui, sikap ketentuan yang berlaku pada setiap masyarakat, pada prinsipnya hal tersebut merupakan konsensus dari anggota-anggota masyarakat. Tetapi kelemahan pada masyarakat desa pada umumnya, dan desa Pakelen pada khususnya ketentuan-ketentuan itu sebenarnya adalah produk dari tokoh masyarakatnya.

Sedangkan anggota-anggota masyarakat itu hanya menerima saja. Walaupun mereka menolak, hal tersebut tidak pernah terapkan karena berkaitan dengan desa. Para tokoh pada umumnya adalah golongan tua yang telah mampu, sedangkan anggota-anggota masyarakat pada umumnya adalah mayoritas bergelut dengan kehidupan sehari-hari menuju daerah perkotaan di Banjarnegara, baik sebagai buruh dan pedagang.

Panutan kepada tokoh masyarakat di Desa Pakelen ternyata sangat tinggi, hal ini sesuai dengan konsep stratifikasi dalam paham etika Jawa, yaitu mereka yang lebih tua selalu dianggap lebih mumpuni dalam mengambil keputusan.

Ada suatu dilema dalam pemerintahan di desa Pekelen. Karena pak lurah Desa Pakelen masih berusia relatif muda, sedangkan para pamong desanya sudah berusia tua. Sehingga dalam menjalankan pemerintahan Desa pak lurah sering merasa pekwuh dan bahkan kadang di sepelekan oleh para pamong desa yang lebih tua. Karenanya pak lurah merasakan jalan pemerintahan desa mengalami hambatan-hambatan sebagai akibat pertentangan antara pak lurah yang masih berusia muda dengan para pamong yang berusia tua. Dengan demikian seakan-akan perbedaan itu mencerminkan adanya bapak dan anak. Sedangkan anak harus selalu menghormati orang tuanya.

Akibatnya memang dapat diraba, para pamong khususnya sekretaris desa karena usianya merasa lebih tua dan lebih berpengalaman, sehingga dia selalu berusaha memaksakan pendapatnya untuk bisa diterima. Sedangkan pak lurah bagaimanapun mempunyai pemikiran bahwa dirinya adalah pemimpin formal desa itu dan syah memimpin jalannya pemerintahan desa.

Pola interaksi yang paternalistik ternyata belum tentu secara tepat untuk diperlakukan dalam manajemen praktis pemerintahan di desa. Pertentangan-pertentangan yang demikian memang tidak menguntungkan bagi jalannya pemerintahan desa oleh pak lurah sendiri. Akan sulit untuk dirubah. Meskipun pak lurah berusaha untuk mengalah, akan tetapi setiap usul dari pak lurah

selalu dikonotasikan itu sebagai usul dari orang kemarin sore. Kondisi-kondisi yang demikianlah yang membuat pak lurah untuk mengambil keputusan tanpa pertimbangan-pertimbangan dari pamong lainnya. Tentunya dengan konsekuensi pak lurah harus mengerjakan semuanya dengan sendirian. Kondisi semacam ini jelas tidak menguntungkan dan menghilangkan control sosial.

Oleh karena itu sudah selayaknya membuka kesadaran bagi para pamong desa tersebut. Karena kalau kondisinya tetap demikian maka unsur demokrasi di dalam pemerintahan desa adalah adanya pembagian kekuasaan.

Desa sebagai lembaga pemerintahan yang ada dalam stratifikasi terbawah adalah lembaga yang ikut serta dalam pelaksanaan administrasi negara, seperti menjalankan ketertiban umum, peradilan dan lain sebagainya. Ciri khas lembaga pemerintahan yang membedakannya dari lembaga-lembaga lain adalah bahwa lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang disusun berdasarkan pranata hukum, sehingga cukup mempunyai kewibawaan dan kekuasaan yang dilimpahkan oleh negara kepadanya.

Pengendalian yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan desa lebih dititik beratkan pada segi represifnya, yaitu menyelesaikan segala persoalan yang telah terjadi. Kasus-kasus yang muncul kepermukaan sering kali berhasil diselesaikan oleh Pak lurah secara damai. Pak Lurah memang berhasil menjaga pernyataan sosial yang harmonis dengan memperkecil sebanyak-banyaknya konflik sosial dan pribadi secara terbuka dalam bentuk apapun, nilai ini ada pada pribadi pak lurah yang menyatakan pandangan Kejawen tentang keseimbangan dan statis emosional sebagai nilai tertinggi, walaupun di dalam batinnya juga mengalami pergolakan-pergolakan.

Sedangkan kurang berperannya lembaga pemerintahan desa dalam pengendalian yang bersifat preventif, karena tidak berperannya secara mengedepan pemerintahan desa, walaupun pemerintahan desa telah mendapatkan pengaturan dan sandaran legalitas sebagaimana mestinya. Usaha-usaha pengendalian yang dilakukan oleh para sesepuh desa dan ulama agama lebih banyak di dasarkan pada norma-norma adat kebiasaan setempat ketimbang norma-norma adat kebiasaan setempat ketimbang norma-norma hukum yang seharusnya dikembangkan dan diterapkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan.

Berkurangnya penghormatan masyarakat desa Pakelen terhadap kepemimpinan pada tingkat desa, lebih banyak disebabkan banyak sekali orang tua-tua di desa pakelen yang selalu memperbandingkan karisma kepemimpinan dahulu dengan sekarang, di tambah lagi sekarang kepala desanya masih berusia relatif muda. Ungkapan-ungkapan yang selalu bernada protes dari kaum tua ternyata membawa pengaruh bagi generasi muda. Di samping itu kemerosotan kewibawaan para pamong desa itu disebabkan karena unsur ceroboh dari para pamong desa itu sendiri, mereka sering kali tidak dapat meninggalkan konsep *mo lomo* sebagai pantangan yang dicerca dalam masyarakat Jawa (*Madon, main, maling, dan lainnya*). Melakukan tindakan *madon* atau *main* perempuan adalah hal biasa bagi para pamong desa di pedesaan Jawa walaupun ini sangat di sirik oleh masyarakat.

Tindakan *madon* atau *main* perempuan adalah warisan kolonial Belanda, yang mengajarkan pada para pamong desa untuk melakukannya dalam bentuk-bentuk skandal dengan warga masyarakat.

Dari kasus-kasus ini menunjukkan bahwa norma-norma hukum ternyata amat sulit untuk dikembangkan di desa Pakelen- sehingga menjadi norma-norma yang melembaga daerah pedesaan, selama alat-alat penegak hukum sendiri, belum dapat menghayati hukum baik secara formil maupun secara materiil. Kesadaran hukum masyarakat sulit sekali dapat dibina bilamana contoh teladan tentang pengakan hukum datang dari atas saja.

Sedangkan beberapa aspek pengendalian sosial dari lembaga keluarga antara lain dapat kita lihat dari sistem-sistem yang telah berkembang dalam lembaga tersebut. Di Pakelen anak sejak kecil sudah diajari ketaatan atau konsep *manut* pada orang tua, juga sejak kecil mereka telah diajari sopan santun terhadap orang lain di luar keluarganya. Mereka dikenalkan pula dengan konsep malu atau *wedi* kepada orang lain. Hal ini nampak ketika bertamu ke rumah-rumah penduduk, anak-anak diharuskan meninggalkan ruangan dan masuk ke dalam rumah serta mereka baru boleh ke luar kalau akan diperkenalkan, mereka juga akan dimarahi oleh orang tuanya apabila membuat gaduh.

Aklaq yang terpuji serta cukup mendapat pendidikan moral agama bagi anak-anak dan pemuda di pedesaan sangat tergantung pada suasana lingkungan keluarga mereka. Kesungguhan para orang tua memperhatikan ahlak anak-anaknya, sebenarnya tidak

dapat dipisahkan dari berperannya gossip dalam masyarakat yang mempunyai arti tersendiri dalam proses pengendalian sosial. Dalam masyarakat Jawa masih berkembang kiasan kacang ora ninggalke lanjarane yaitu anak tidak dapat lepas dari tingkah laku orang tuanya. Jadi masyarakat senantiasa menimpakan segala kesalahan, keburukan si anak pada orang tuanya.

Dalam tradisi perkawinan, masyarakat Pakelen masih banyak yang dijodohkan orang tuanya. Dilihat dari perkembangan jaman sistem perjodohan yang banyak ditentukan oleh orang tuanya banyak sisi buruknya. Akan tetapi dilihat dari segi pengendalian sosial, terdapat unsur-unsur yang positif antara lain tercegahnya pergaulan bebas yang menjurus pada krisis moral.

Karena pada umumnya pihak orang tua enggan bermenentukan seorang gadis yang sudah terkenal terlibat dalam pergaulan bebas. Tidak sedikit kasus yang ditemui di desa Pakelen mengisyaratkan gagalnya perkawinan karena salah satu pihak ada yang terlibat dalam skandal seks.

Banyak pula kasus yang muncul di desa Pakelen yaitu perkawinan yang dibatalkan oleh karena tidak disetujui oleh orang tua. Orang tua selalu merasa memiliki aib yang besar dan sekaligus menunjukkan besarnya tanggung jawab mereka atas perbuatan anak-anaknya, sehubungan dengan kasus-kasus yang tidak diinginkan. Lingkungan rumah tangga menjadi tidak harmonis apabila muncul keaiban dalam keluarga. Keaiban yang terjadi dalam lingkungan keluarga merupakan hal yang paling sensitif.

Masyarakat desa Pakelen masih berorientasi pada pola agraris tradisional, dalam beberapa hal mengenai sistem perkeonomian-nya masih bersinggungan dengan sistem pengendalian sosial. Dalam sistem perekonomian mereka faktor kejujuran dan kerajinan merupakan faktor penting untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat pada umumnya.

Seseorang yang dikenal sebagai penipu, atau melakukan tindakan tercela dalam perjanjian perekonomian, sering menjadi bahan pergunjungan di masyarakat. Saat sekarang sudah mulai berkembang konsep malu apabila mereka tidak bekerja. Dan bekerja keras sudah semakin menjadi cita-cita.

B. Di Desa Kutobanjarnegara.

Setiap masyarakat manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan tersebut bagi masyarakat

yang bersangkutan maupun bagi orang-orang luar yang menelaahnya, dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok, ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta adapula perubahan-perubahan yang lambat sekali, akan tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat.

Perubahan-perubahan tersebut hanya akan dapat ditemukan oleh seseorang yang sempat meneliti susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu serta membandingkannya dengan susunan dan kehidupan masyarakat tersebut pada waktu lampau.

Seseorang yang tidak sempat untuk menelaah susunan dan kehidupan masyarakat di Indonesia akan berpendapat bahwa masyarakat tersebut statis, tidak maju dan tidak berubah. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya.

Sebuah desa di Banjarnegara yang bernama Kutobanjarnegara, termasuk mengalami perubahan-perubahan seperti yang diisyaratkan di atas. Desa Kutobanjarnegara merupakan desa yang terletak di pusat perkotaan dan menjadi ibukota dari Kabupaten Banjarnegara.

Desa Kutobanjarnegara memiliki ciri sebagai masyarakat perkotaan maka masyarakatnya termasuk urban community, adalah masyarakat kota yang tidak tertentu jumlah penduduknya.

Tekanan pengertian kota terletak pada sifat-sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Antara warga masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan juga terdapat perbedaan dalam perhatian, khususnya terhadap keperluan hidup.

Di daerah Kutobanjarnegara memiliki jumlah penduduk 9450. Mayoritas penduduk Kutobanjarnegara adalah pegawai negeri. Di masyarakat Kutobanjarnegara sistem pengendalian sosial berjalan cukup efektif dikarenakan di desa ini sebagai ibukota Kabupaten Banjarnegara.

Karena letaknya yang strategis ini membuat sistem pengendalian sosial berjalan dengan baik sesuai dengan konsep budaya Jawa yang mengatakan tentreming projo. Masyarakatnya berhasil

meletakkan solidaritas sosial tersebut diatas kesadaran penuh dari seluruh anggota masyarakat. Setiap ketentuan dan peraturan yang berlaku merupakan hasil dari suatu konsensus semua warga. Semua kepentingan-kepentingan mereka terangkan didalamnya.

Warga masyarakat Kutobanjarnegara meletakkan konsensus diatas prinsip heteroginitas, maka mereka menyadari akan arti persatuan diatas heterogenitas.

Pola interaksi yang demikian ini memang mampu melahirkan jaringan-jaringan sosial yang kuat sekali, dan pada akhirnya pengendalian sosial itu dilakukan karena adanya kesadaran untuk terciptanya tertib sosial dalam masyarakat. Mereka mengantisipasi setiap perubahan itu dengan kreativitas-kreativitas yang tinggi dalam pelaksanaan pengendalian sosial.

Yang paling menonjol dari kehidupan keluarga adalah penanaman nilai hormat dan rukun. Penanaman nilai hormat dan rukun itu tidak dilaksanakan secara kaku. Nilai hormat pada keluarga-keluarga di Kalurahan Kutobanjarnegara berupa menghormati kepentingan orang lain disamping adanya kewajiban untuk menjunjung tinggi martabat keluarga sebagai suatu kehormatan.

Di semua masyarakat yang pernah dikenal, hampir semua orang hidup terikat dalam jaringan kewajiban dengan hak keluarga yang disebut sebagai hubungan peran. Seseorang disadarkan akan adanya hubungan peran tersebut karena proses sosialisasi yang sudah berlangsung sejak masa kanak-kanak, yaitu suatu proses dimana ia belajar mengetahui apa yang dikehendaki oleh anggota keluarga lain daripadanya, yang akhirnya menimbulkan kesadaran tentang kebenaran yang dikehendaki, tetapi ada orang yang merasakan kewajiban itu sebagai beban atau tidak perduli akan hak-hak tersebut.

Penanaman nilai yang baik serta berjalan secara demokratis membawa dampak yang positif bagi generasi muda. Lembaga pemerintahan desa program-programnya selalu didukung oleh masyarakat, karena pak lurah memiliki kewibawaan didalam menjalankan perintah-perintah. Disamping itu masyarakat perkotaan yang semakin permissive membuat lembaga pemerintahan dengan leluasa menjalankan program-programnya.

Anak-anak di desa Kutobanjarnegara biasanya masuk Taman Kanak-kanak pada usia 5 tahun, antara umur 6-12 tahun mereka

bersekolah di SD. Masyarakat Kutobanjarnegara telah menyadari bahwa pendidikan sekolah merupakan unsur penting untuk kehidupan di masakini. Mereka dengan sendirinya selalu berusaha mengirimkan anaknya ke sekolah yang paling baik.

Para remaja pada umumnya rajin belajar, sedangkan sebagian kecil dari mereka sudah ada yang bekerja, sulit sekali menemui penanggaran di desa itu. Isi semua dilakukan untuk meningkatkan prestise atau kehormatan keluarga.

Di desa itu kehormatan keluarga masih dijaga dengan penuh, keluarga-keluarga yang memiliki status sosial yang tinggi dan terpandang selalu menjaga kondisinya agar selalu dihormati oleh masyarakat. Para remajanya dalam mengisi acara-acara di luar kesibukan rutinnnya, mereka memanfaatkan kegiatan-kegiatan olah raga serta kesenian. Olah raga yang paling populer dilingkungan remaja Kutobanjarnegara adalah bola volley, dan sepak bola, disamping itu olah raga tenis meja mulai banyak digemari.

Untuk keseniannya mereka mulai membentuk orkes keroncong serta band. Khusus untuk group bandnya pernah mendapat juara ke 2 dalam suatu festival kesenian di Semarang.

Dalam lembaga kegamaan masih nampak berbagai susunan pola-pola kepercayaan dan tingkah laku yang bersangkutan dengan hubungan antara manusia dengan alam gaib. Tugas utama dari agama adalah memberi petunjuk dan orientasi kearah itu. Orientasi diatas mengambil bentuk usaha memohon pertolongan dan mendapat perlindungan dari Tuhan, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, menyelenggarakan dakwah, memberi kedudukan yang terhormat kepada para ulama.

Di desa Kutobanjarnegara dasar pendidikan agama bagi mereka adalah ngaji. Mereka juga menulis dan membaca huruf arab tetapi belajar mengaji terutama menghafal surah-surah al-qur'an.

Di Kalurahan Kutobanjarnegara pernah pula terjadi penyimpangan seksual. Seorang pria dari daerah luar, konon menurut informasi yang ada sudah beristri dan beranak, sering mendatangi wanita di daerah itu, yang nota bene sudah bersuami. Istilah yang sering digunakan dalam kasus-kasus serupa ini dikenal dengan melanggar pagar ayu. Ternyata reaksi masyarakat bukan berupa tindakan yang beramai-ramai tetapi memberikan mandat sepenuhnya pada para perangkat desa untuk menasehati kepada pihak-pihak yang terlibat. Dari sini terlihat bahwa sikap mereka karena

dilandasi oleh kebutuhan akan ketentraman dan ketertiban, sehingga akan merasa tenang tinggal di Kalurahan Kutobanjarnegara.

Pengaruh Kabupaten Banjarnegara yang terletak di desa Kutobanjarnegara ternyata cukup besar dalam pengendalian sosialnya. Hal ini terjadi karena banyaknya aparat pemerintah daerah yang ikut menjadi pengawas jalannya kontrol sosial. Dalam masyarakat Jawa lama juga nampak suatu daerah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan akan terjadi kontrol sosial dengan efektif karena dipengaruhi konsep *memayu hayuning bawana*.

D. Analisis Hubungan Lembaga Sosial dan Pengendalian Sosial di Masyarakat Jawa Tengah.

Ada kaitan yang erat antara lembaga sosial dengan pengendalian sosial. Adalah tidak mungkin suatu lembaga dapat dipertahankan tanpa adanya pengendalian sosial. Karena proses manapun dari lembaga-lembaga sosial termasuk di dalamnya adat-istiadat, tidak melancarkan pengendalian sosial.

Yang melakukan pengendalian sosial adalah mereka yang mempertahankan adat-istiadat, yang terlibat dalam proses dan berperan dalam mempertahankan lembaga-lembaga sosial. Mereka yang menegakkan adat-istiadat gagasan dan tujuan masyarakat, berusaha agar orang lain taat pada adat-istiadat, gagasan dan tujuan itu.

Dengan demikian pribadi-pribadi dalam kapasitasnya, pengalaman maupun aktivitasnya merupakan masyarakat, sedangkan pengendalian merupakan salah satu fungsi pencipta kondisi bagi kepribadian manusia. Oleh karena itu apabila dikatakan warga masyarakat dikendalikan oleh adat-istiadat dan lembaga sosial, maka maksudnya pengendalian itu terlaksana melalui orang-orang.

Berdasarkan pemikiran ini berarti salah satu cara untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengendalian sosial dengan berbagai kekhasannya, khususnya pada masyarakat pedesaan adalah dengan mengetahui bagaimana mereka terlibat dalam proses-proses sosial termasuk di dalamnya adalah mempertahankan adat-istiadat yang ada.

Dan salah satu cara untuk mengetahui bagaimana pengendalian sosial berdasarkan adat-istiadat Jawa tersebut masih ada dan mendukung pelaksanaan pembangunan adalah dengan melihat bagaimana kehidupan keluarga-keluarga Jawa terutama keluarga pada masyarakat desa dengan segala perubahannya.

BAB V

PENGENDALIAN SOSIAL DAN ADAT-ISTIADAT

A. Adat-istiadat Dalam Masyarakat

Ciri utama dari suatu masyarakat manusia ialah suatu kebudayaan sebagai hasil dari berbagai karya, rasa dan cipta manusia selaku makhluk berakal, baik untuk melindungi dirinya sendiri dari keganasan alam maupun dalam rangka menaklukkannya, ataupun untuk menyelenggarakan hubungan hidup bermasyarakat secara tertib dan utuh.

Salah satu hasil karya, rasa dan cipta untuk menyelenggarakan kehidupan yang tertib dan utuh itu, ialah lahirnya nilai-nilai yang berujud norma-norma yang berisikan ketentuan-ketentuan bagaimana seharusnya tindakan-tindakan anggota masyarakat yang tertib bukan hanya terdiri dari hasil karya, rasa dan cipta manusia saja akan tetapi juga berada di luar kehendak manusia itu sendiri yaitu norma-norma agama yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang berada di luar norma-norma adat dan hukum di masyarakat.

Adat-istiadat senantiasa tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat yang nyata, cara berpikir dan pandangan hidup yang secara keseluruhan merupakan kebudayaan dari masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat dimana adat-istiadat itu hidup dan berkembang. Adat-istiadat suatu tempat merupakan norma-norma yang telah berlaku sepanjang masa dan telah diwariskan secara turun menurun sehingga merupakan sesuatu yang harus

dipatuhi dalam menyelenggarakan kepentingan bersama. Norma-norma tersebut berlaku oleh tekanan-tekanan masyarakat pendukungnya dan pejabat-pejabat adat.

Walaupun demikian perlu diperhatikan bahwa adat-istiadat dapat saja berubah sewaktu-waktu dengan timbulnya peristiwa-peristiwa ataupun kebutuhan-kebutuhan baru yang memerlukan penyelesaian dan penyesuaian secara baru pula. Jika suatu keadaan dan kebutuhan tertentu timbul serta masyarakat mengakui keadaan dan cara penyelesaian itu maka tersusunlah norma-norma baru itu dalam praktek menggantikan adat-istiadat yang lama.

Adanya hukum sebagai salah satu kaidah sosial merupakan suatu kenyataan yang sulit benar untuk dibantah. Sulitlah bagi kita untuk menggambarkan adanya suatu masyarakat tanpa hukum, baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Masyarakat manusia membutuhkan ketertiban dan jaminan hak-hak sedangkan kepastian dan ketertiban itu sendiri merupakan tujuan dari hukum yang membedakannya dengan lain-lain norma, ialah penataannya dapat dipaksakan dengan cara yang teratur dengan memakai alat-alat kekuasaan yang ditentukan batas-batas wewenangnya oleh hukum pula.

Berbeda dengan norma-norma hukum dan adat-istiadat maupun hukum adat, norma-norma agama sama sekali bukan hasil cipta rasa manusia dan oleh karenanya bukanlah hasil dari suatu kebudayaan karena agama adalah kaidah-kaidah yang berasal dari kekuatan dan kekuasaan diluar manusia itu sendiri.

Norma-norma agama seperti syariah didasarkan pada keyakinan atau iman. Menurut paham Islam syariah mengatur segala tingkah laku dan barang siapa menolok hal itu akan dianggap bukan seorang muslim. Berkembang dan meresapnya norma-norma ajaran Islam kedalam berbagai kebudayaan dan norma-norma penduduk asli Indonesia telah menjadi kenyataan.

B. Pengendalian Sosial dan Adat-istiadat di Desa Pakelen.

Adat dan hukum adat secara teoritis akademis sulit untuk dibedakan, karena kedua gejala sosial tersebut berkaitan dengan erat. Di Desa Pakelen adat dan hukum adat dipergunakan oleh anggota-anggota masyarakat hukum adat secara bersamaan. Yang jelas adat dan hukum adat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat, pengaruh yang kuat tersebut serta daya pengikatnya yang

sangat kuat bergantung dari masyarakat hukum adat itu, terutama berpangkal tolak dari perasaan keadilannya.

Di kalangan masyarakat Pakelen jarang istilah hukum adat dipergunakan, tetapi lazim dipergunakan istilah adat saja. Adapun istilah yang dipergunakan yang jelas hukum itu ada sebagai hukum yang hidup, yang sebagian besar tidak tertulis, yang unsurnya sebagian besar terdiri dari kebiasaan. Hal ini merupakan sejumlah nilai yang menjadi pedoman atau patokan untuk bertingkal laku bagi para anggota masyarakat desa Pakelen ini berfungsi sebagai pengendalian sosial.

Adat-istiadat yang mengandung makna hukum memiliki fungsi pengatur, penertib dan pengaman kehidupan masyarakat. Penegak keadilan terutama yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi lemah, juga penggerak dan pendorong pembangunan dan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Hal lainnya adalah faktor penjamin keseimbangan dan keserasian yang dinamis dalam masyarakat yang mengalami perubahan cepat.

Menurut hukum adat perkawinan merupakan urusan kerabat keluarga persekutuan, martabat, juga dapat merupakan urusan pribadi tergantung pada susunan masyarakat yang bersangkutan, dengan demikian menunjukkan di Desa Pakelen bahwa bidang perkawinan sebagian besar warga masyarakat masih berdasarkan pada ketentuan pada lembaga-lembaga adat.

Di Pakelen juga masih berlaku adat yang menentukan bahwa 2 orang tidak boleh saling kawin apabila mereka saudara sekandung, apabila mereka itu pancer lanang, yaitu anak dari 2 orang anak saudara kandung laki-laki, apabila mereka adalah misan dan akhirnya apabila pihak laki-laki lebih muda menurut ibunya daripada pihak wanita, disamping itu di Desa Pakelen masih berlaku upacara-upacara tradisional di dalam perkawinan.

Dari pembicaraan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan masyarakat Pakelen masih merupakan urusan kerabat daripada urusan pribadi yang akan melangsungkan perkawinan. Di Pakelen pertunangan adalah suatu hal yang khusus dan tidak begitu banyak yang melakukannya. Tapi kawin melamar masih menjadi tradisi yang di patuhi oleh masyarakat desa Pakelen.

Masyarakat Pakelen mayoritas masih menganggap perkawinan warga sedesa adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur, sarana yang melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya.

Hal ini merupakan bentuk pengendalian sosial yang cukup efektif di dalam mengontrol munculnya skandal seks. Di samping itu di dalam lingkungan persekutuan kerabat itu perkawinan juga diharapkan dapat meneruskan garis trah keluarga tertentu.

Suatu perkembangan yang cukup baik, baik di desa Pakelen adalah pandangan masyarakat terhadap poligami yang sudah mulai dianggap tidak rasional lagi. Karena seringkali menimbulkan ketidaktentraman dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat sudah banyak yang beranggapan poligami hanya untuk pemenuhan kebutuhan seksual saja.

Mengenai usia perkawinan, walaupun masih banyak yang melakukan perkawinan di bawah usia 20 tahun tetapi persepsi masyarakat semakin menyadari bahwa perkawinan anak-anak tidak sesuai lagi dengan jaman pembangunan. Masyarakat desa Pakelen sebetulnya masih setuju dengan perkawinan tambelan, yaitu apabila anaknya telah hamil dahulu dan tidak ada yang mau mengakui sebagai ayahnya maka biasanya pria tersebut diambilkan dari keluarganya yang memiliki status ekonomi dan sosial lebih rendah, hal ini dilakukan demi menjaga martabat dan nama baik keluarga tersebut. Ini sebagai contoh dari pengendalian sosial masyarakat jawa yang mengenal konsep isin atau malu.

Status hukum anak yang lahir tanpa kawin syah terlebih dahulu dalam masyarakat Pakelen masih dianggap sebagai anak haram jadah, hal ini mungkin karena pengaruh hukum Islam, maka masyarakat Pakelen selalu heboh apabila ada bayi yang lahir tanpa ayah.

Sedangkan adat-istiadat yang berhubungan dengan sistem religi ada fakta mengenai salah satu aspek dari agama yaitu aspek ritus. Sebagian masyarakat Pakelen kalau menderita sakit belum segera berfikir untuk minta pertolongan dokter, tetapi pergi kepada wong tuwo, atau dukun, dan juga dengan cara-cara yang tidak rasional di dalam mengusir penyakit, yaitu menggunakan tenaga gaib.

Sedangkan di kalangan petani seringkali kaum tani berusaha menyuburkan tanahnya dan memperbanyak hasil panennya dengan menanamkan bubur dipojok-pojok dari sawah mereka, dan dikaburkan pada bajaknya.

Ketika akan menuai padi juga diadakan upacara pemetikan yang sifatnya magis, dalam usaha menanggulangi hama-hama

sering diadakan upacara ngruwat yang maksudnya minta atau menyuruh pergi roh-roh halus yang mereka percayai menjadi hama. Cara berpikir yang demikian ini menunjukkan bahwa mereka beranggapan adanya persekutuan alam semesta yang hasil dari persekutuan ini dapat mengendalikan tata kosmos.

Masyarakat Pakelen masih percaya akan adanya kekuatan kasekten, kemudian arwah atau roh leluhur dan makhluk-makhluk halus lainnya. Karena itu apabila mereka ingin hidup tentram dan tidak mendapat gangguan ia harus memperngaruhi alam semesta dengan melakukan persekutuan misalnya berprihatin, berpuasa, berpantang, berselamatan dan bersesaji. Selamatan dan sesaji masih dilakukan secara efektif di Pakelen, misalnya untuk selamatan kematian.

C. Pengendalian Sosial dan Adat-istiadat di Desa Kutobanjarnegara.

Di desa Kutobanjarnegara adat istiadat yang masih nampak mengedepan adalah upacara upacara perkawinan. Karena masyarakat di sana menganggap perkawinan sebagai terbentuknya somah baru yang segera akan memisahkan diri baik secara ekonomi maupun tempat tinggal, lepas dari kelompok orang tua dan membentuk sebuah basis untuk sebuah rumah tangga baru.

Di desa Kutobanjarnegara persepsi perkawinan yang mendasarkan pada upacara-upacara tradisi jawa semakin mulai digemari lagi, seakan-akan lahirnya bentuk neofeodalisme sebagai pelarian dari kondisi masyarakat yang semakin teralienasi dari kondisi masyarakat yang semakin teralienasi dari kehidupan yang guyup.

Pola perkawinan di desa Kutobanjarnegara yang bersifat parental itu ternyata sudah memasuki kawasan gengsi dan kepentingan ekonomi. Akhurnya proses pencarian jodohpun sudah mulai dengan pertimbangan kemampuan perekonomian.

Upacara-upacara setelah perkawinan ketika sang istri sudah mulai hamil masih tetap dilakukan oleh masyarakat Kutobanjarnegara seperti upacara mitoni, dan bancakan-bancakan lainnya.

Pada upacara-upacara perkawinan dan kelahiran bahkan kematian menampilkan bentuk-bentuk ritus magis sehingga dapat disimpulkan masyarakat Kutobanjarnegara masih mengenal konsep magis di dalam mengendalikan tata kosmos agar tentram dan tidak ada beboyo.

Mengenai adat-istiadat yang bersifat menghukum apabila warga masyarakat melakukan pelanggaran norma sudah tidak berjalan secara efektif, masyarakat sudah menyerahkan seluruh kasus yang muncul kepada yang berwenang, sebagai misal kepada Bapak RT. Ini menunjukkan masyarakat semakin permissive, karena mereka sudah terlalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.

D. Analisis Hubungan Adat-Istiadat dan Pengendalian Sosial Masyarakat Jawa Tengah.

Dalam masyarakat di Jawa Tengah adat-istiadat kurang dapat diformulasikan menjadi suatu etos pembangunan. Dengan demikian partisipasi yang muncul adalah partisipasi berupa keterasingan. Norma-norma budaya Jawa dirasakan tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup anggota masyarakat, karena ketidakmampuannya memecahkan masalah-masalah kebutuhan hidup yang harus terpenuhi.

Ini bukan berarti budaya jawa sudah tidak sesuai dan ketinggalan jaman. Akan tetapi sebenarnya terjadi karena pijakan dari semua perubahan tersebut di atas prinsip-prinsip nilai-nilai luar yang modern. Di samping ketidakmampuan masyarakat di dalam mengapresiasi atau mengkreatifkan nilai-nilai itu untuk digabungkan menjadi bentuk etos pembangunan.

BAB VI KESIMPULAN

A. Rumusan Pokok-pokok Temuan Penelitian.

Dalam kehidupan masyarakat di Jawa Tengah dewasa ini masih nampak adanya nilai-nilai atau kaidah-kaidah dalam perilaku sehari-hari.

Ada 2 kaidah yang paling menentukan pola pergaulan dalam masyarakat Jawa. Kaidah pertama mengatakan, bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa hingga tidak sampai menimbulkan konflik. Kaidah ke dua menuntut agar manusia dalam cara bicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya.

Kaidah pertama disebut sebagai prinsip kerukunan, dan kaidah kedua disebut sebagai prinsip hormat. Ke dua prinsip itu merupakan kerangka normatif yang menentukan bentuk-bentuk konkrit semua interaksi. Tuntutan dua prinsip itu selalu disadari oleh orang Jawa sebagai anak ia telah membatinkannya dan ia sadar bahwa masyarakat mengharapkan agar kelakuannya selalu sesuai dengan dua prinsip tersebut.

Dari dua kaidah ini kemudian terapkan ke dalam bentuk pengawasan keluarga oleh kepala rumah tangga. Suatu konflik biasanya pecah apabila kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan bertabrakan. Sebagai cara bertindak kerukunan menuntut agar individu bersedia untuk menomorduakan, bahkan

kalau perlu, untuk melepaskan kepentingan pribadi demi kesepakatan bersama.

Mengusahakan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan persetujuan masyarakat, berusaha untuk maju sendiri tanpa mengikutsertakan kelompok individu kurang baik. Begitu pula mengambil inisiatif sendiri condong untuk tidak disenangi.

Karena suatu inisiatif seakan-akan membuka tanah baru dan selalu mengubah sesuatu pada keseimbangan sosial yang sudah tercapai. Inisiatif-inisiatif dengan mudah dapat melanggar kepentingan-kepentingan yang sudah tertanam dan sudah terintegrasi secara sosial dan oleh karena itu dapat menimbulkan konflik.

Individu seharusnya selalu bertindak bersama dengan kelompok. Mengambil posisi yang terlalu maju juga dengan tujuan-tujuan yang akhirnya akan menguntungkan bagi seluruh kelompok dianggap tidak pantas. Apabila telah ada kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan maka diperlunak dengan teknik-teknik kompromi tradisional dan diintegrasikan ke dalam tatanan kelompok yang ada sehingga tidak sampai timbul konflik. Ambisi-ambisi pribadi sering kali tidak boleh diperlihatkan.

Namun bahaya yang sebenarnya bagi kerukunan dalam masyarakat tidak terletak dalam kepentingan obyektif yang bertentangan itu sendiri. Antara kebanyakan kepentingan yang bertentangan dapat tercapai suatu kompromi. Hal itu sering malahan sesuai dengan kepentingan yang sebenarnya dari semua pihak yang terlibat.

Olah karena itu masyarakat Jawa Tengah telah mengembangkan norma-norma kelakuan yang diharapkan dapat mencegah terjadinya emosi-emosi yang bisa menimbulkan konflik atau sekurang-kurangnya dapat mencegah jangan sampai emosi-emosi itu pecah secara terbuka.

Norma-norma itu berlaku dalam semua lingkup hidup masyarakat kecuali dalam lingkungan keluarga inti, dimana kekuatan simpati (tresna) biasanya mencegah terjadinya emosi-emosi agresif atau sekurang-kurangnya dapat membatasinya. Norma-norma itu dapat diragukan dalam tuntutan untuk bersikap tenang, untuk tidak menjadi bingung, untuk tidak menunjukkan rasa kaget atau gugup. Sebaliknya orang selalu harus berlaku sedemikian rupa sehingga orang lain tidak sampai merasa bingung atau kaget.

Kaidah ke dua yang menimbulkan peranan besar dalam mengatur pola interaksi dalam masyarakat Jawa Tengah ialah prinsip hormat. Prinsip itu mengatakan bahwa setiap orang dalam cara bicara dan membawa diri selalu harus menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya.

Apabila 3 orang bertemu terutama 2 orang Jawa bahasa pembawaan dan sikap mereka mesti mengungkapkan suatu pengakuan terhadap kedudukan mereka masing-masing dengan terperinci dan cita rasa. Mengikuti aturan-aturan tatakrama yang sesuai, dengan mengambil sikap hormat atau kebabakan yang tepat adalah penting.

Prinsip hormat berdasarkan pendapat, bahwa semua hubungan dalam masyarakat teratur secara hirarki, bahwa keteraturan hirarkis itu bernilai pada dirinya sendiri dan oleh karena itu orang wajib untuk mempertahankannya dan untuk membawa diri sesuai dengannya. Pandangan itu sendiri berdasarkan cita-cita tentang suatu masyarakat yang teratur baik, dimana setiap orang mengenal tempat dan tugasnya, dan dengan demikian ikut menjaga agar seluruh masyarakat merupakan suatu kesatuan yang selaras. Kesatuan itu hendaknya diakui oleh tata krama sosial yaitu dengan cara membawakan diri.

Mereka yang berkedudukan lebih tinggi harus diberi hormat. Sedangkan sikap yang paling tepat terhadap mereka yang berkedudukan lebih rendah adalah sikap kebabakan dan rasa tanggung jawab. Kalau setiap orang menerima kedudukannya itu maka tatanan sosial terjamin oleh karena itu setiap orang dilarang untuk mengembangkan ambisi-ambisi, tidak bersaing satu sama lain, melainkan hendaknya setiap orang puas dengan kedudukan yang telah diperolehnya, dan berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Dan prinsip hormat ini paling nampak menonjol dalam penggunaan bahasa Jawa serta cara bagaimana seorang Jawa pertama kali bersikap dalam satu pembicaraan yang selalu terlintas adalah tingkat kehormatan mana yang harus saya tunjukkan kepadanya.

Kepastian dalam menggunakan sikap-sikap hormat yang tepat dikembangkan pada orang Jawa sejak kecil melalui pendidikan dalam keluarga. Pendidikan itu tercapai melalui 3 perasaan yang dipelajari oleh anak Jawa dalam situasi-situasi yang menuntut

sikap hormat yaitu wedi, isin, dan sungkan. Wedi berarti takut baik sebagai reaksi terhadap ancaman fisik maupun rasa takut terhadap akibat kurang enak suatu tindakan.

Pertama-tama anak belajar untuk merasa wedi terhadap orang yang harus dihormati. Anak dipuji apabila bersikap wedi terhadap orang yang lebih tua dan terhadap orang asing. Bentuk-bentuk pertama kelakuan halus sopan didik pada anak dengan menyindir pada segala macam bahaya mengerikan dari pihak-pihak asing. Dan kekuatan-kekuatan diluar keluarga yang akan mengancamnya.

Tidak lain kemudian mulailah pendidikan untuk isin. Belajar untuk merasa malu adalah langkah pertama kearah kepribadian Jawa yang matang. Sebaliknya penilaian orang mengerti isin merupakan suatu kritik yang amat tajam. Isin dan sikap hormat merupakan suatu kesatuan. Orang Jawa merasa isin apabila tidak dapat menunjukkan sikap hormat yang tepat terhadap orang yang pantas dihormati. Perasaan isin dapat muncul dalam semua situasi sosial. Apabila anak sudah kurang lebih berumur 5 tahun maka ia sudah mengerti konteks mana yang harus membuat dia merasa isin.

Semakin dia dewasa dan semakin ia diakui sebagai anggota masyarakat Jawa Tengah secara penuh. Selama tahun-tahun ini orang Jawa belajar merasa sungkan. Sungkan suatu perasaan yang dekat dengan isin, tetapi berbeda dengan anak yang merasa malu dengan orang asing.

Sungkan adalah malu dalam arti yang positif. Sungkan merupakan rasa hormat yang sopan terhadap atasan atau sesama yang belum dikenal. Sungkan adalah rasa malu positif yang dirasakan berhadapan dengan atasan.

Wedi, isin dan sungkan merupakan suatu kesinambungan perasaan-perasaan yang mempunyai fungsi sosial untuk memberikan dukungan psikologis terhadap tuntutan-tuntutan prinsip hormat. Dengan demikian individu merasa terdorong untuk selalu mengambil sikap hormat. Sedangkan kelakuan yang kurang hormat menimbulkan rasa tidak enak.

Kita telah mengetahui bahwa masyarakat Jawa mengatur interaksi-interaksinya melalui 2 prinsip, prinsip kerukunan dan prinsip hormat. 2 prinsip ini menuntut bahwa dalam segala bentuk interaksi konflik-konflik terbuka harus dicegah dan bahwa dalam

situasi pangkat dan kedudukan semua pihak yang bersangkutan harus diakui melalui sikap-sikap hormat yang tetap. 2 prinsip itu berhubungan erat satu sama lainnya.

Keunggulan prinsip-prinsip keselarasan pertama-tama merupakan suatu kenyataan sosiologis serta prinsip suatu prinsip regulatif sosial lain, sebagai misal hukum positif. Dalam pandangan Jawa prinsip-prinsip keselarasan pertama-tama harus didahulukan terhadap hukum positif. Mempertahankan hak-haknya menurut hukum-hukum positif berhadapan dengan prinsip-prinsip keselarasan tidak disetujui. Namun dalam kenyataan dalam masyarakat yang ditentukan oleh prioritas prinsip-prinsip keselarasan itu memang sudah tidak ada lagi.

Tetapi bagi kita yang lebih penting adalah implikasi-implikasi etis. Titik tolaknya adalah bahwa prinsip-prinsip keselarasan menurut sesuatu dari individu. Masyarakat Jawa agar usahanya untuk menjamin kepentingan-kepentingan dan hak-haknya sendiri jangan sampai mengganggu keselarasan sosial. Prinsip kerukunan secara prinsip melarang pengambilan posisi yang bisa menimbulkan konflik, prinsip hormat melarang pengambilan posisi-posisi yang tidak sesuai dengan sikap-sikap hormat yang di tuntutan. Prinsip-prinsip keselarasan dengan demikian memuat larangan mutlak terhadap usaha untuk bertindak hanya atas dasar kehendak seseorang sendiri-sendiri saja.

B. Kesimpulan.

Di dalam pengendalian sosial di masyarakat Jawa Tengah yang mengambil kasus dalam 2 desa dapat disimpulkan: bahwa norma-norma adat kebiasaan dan agama mempunyai intensitas yang boleh dikatakan sebagai sama berat untuk dijadikan pedoman dalam pengendalian sosial di lembaga-lembaga sosial masyarakat. Menonjolnya peranan norma-norma tersebut dan kurang berperannya norma-normapun, dalam banyak hal disebabkan karena sistem pemerintahan desa belum mempunyai kesadaran hukum sebagai mana mestinya, disamping itu masyarakat pedesaan tidak mempunyai kemampuan moral dan material untuk menjangkau keadilan melalui lembaga-lembaga penegak hukum. Tetapi hal ini untuk daerah Kutobanjarnegara tidak begitu mengedepan karena dipengaruhi adanya Kabupaten.

Di dalam pengembangan kelembagaan khususnya lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa adalah penting sekali. Disamping

untuk menunjang keberhasilan dari pembangunan itu sendiri hal tersebut sangat bermanfaat bagi diterapkannya pengendalian sosial yang lebih mapan.

Dan dari membandingkan 2 desa penelitian diatas kiranya dapat disimpulkan bahwa letak perbedaan utama sistem pengendalian sosial antara desa Pakelen dengan Kalurahan Kutobanjarnegara adalah pergeseran dalam hal sistem solidaritas masyarakatnya. Bagi desa Pakelen secara serius dan lebih intensif, agar pelaksanaan pengendalian sosial itu dapat mencapai sasarannya yaitu untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Sedangkan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kelembagaan tersebut adalah aspek ideologi, aspek kepemimpinan, aspek kelembagaan itu sendiri. Sedangkan bagi Kalurahan Kutobanjarnegara itu sendiri format dari pengendalian sosialnya sudah terlihat jelas. Adapun yang perlu diperhatikan adalah terletak pada kesinambungan dari pelaksanaan pengendalian sosial itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Craib, Ian, 1984, *Teori-teori sosial Modern dari Parsons sampai Habermas*, terjemahan Paul S. Baut dan T. Efendi, Jakarta : CV Rajawali.
- Djamari, 1988, *Agama Dalam Perspektif Sosiologi*, Jakarta : Depdikbud.
- Geertz, 1960, *The Religion of Java*, Glencoe III, The Free Press.
- Haryatmoko, J, 1986, *Manusia dan Sistem - Pandangan Tentang Manusia Dalam Sosiologi Talcott Parsons* Yogyakarta Kanisius.
- Harjowirogo, Marbangun, 1989, *Manusia Jawa*, Jakarta : CV Haji Mas Agung.
- Kirk, J, Miller, Ml. 1986, *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Beverly Hills : Sage Publication.
- Koentjaraningrat, 1984, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Marshal, Catherine, 1989, *Designing qualitative Research*, Sage Publication, The publisher of profesional sosial science, Newbury Park.
- Muhadjir, Noeng, 1989, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin Po. Box. 83.
- Mulders, Niels, 1983, *Jawa - Thailand Beberapa Perbandingan Sosial Budaya*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

- , 1985, *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari orang Jawa, Kelangsungan dan Perubahan Kultural*, Jakarta : Gramedia.
- Nasution, 1988, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung Transito.
- Niels, R, Van, 1960, *The Emergence of The Modern Indonesian Elite*, The Hague, Bandung W. Van Hoeve ltd.
- Patton, MQ, 1984, *Qualitative Evaluation Methods*, Beverly Hills : Saga Publication.
- Paul Johson, Doyle, 1986, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II*, Jakarta Gramedia.
- Ramdom, M, 1976, *Magi Dikalangan Masyarakat Jawa yang Sederhana*, Majalan Aljamiah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta No. 13.
- Sanapiah F. 1990, *Penelitian Kualitatif*, Malang : YA 3.
- S. Soedjito, 1986, *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Soekanto, Soeryono, 1982, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- , 1986, *Talcott Parsons Fungsionalisme Interaktif*, Jakarta CV Rajawali.
- , 1987, J.S. Roucek : *Pengendalian Sosial*, Jakarta : CV Rajawali.
- , 1988, *Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Taneko, B. Soleman, *Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta CV Fajar Agung.

DAFTAR INFORMAN

Untuk Desa Pakelen :

1. Nama : Jono
Umur : 30 th
Agama : Islam
Pendidikan : Tamat SMTA
Bahasa yang dikuasai : Bahasa Jawa dan Indonesia
Asli : Desa Pakelen
Pekerjaan : Kepala Desa Pakelen

2. Nama : Suwito
Umur : 44 th
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Bahasa yang dikuasai : Bahasa Jawa
Asli : —
Pekerjaan : Petani

3. Nama : Sumodiharto
Umur : 45 th
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Bahasa yang dikuasai : Bahasa Jawa
Asli : —
Pekerjaan : Petani

4. Nama : Muhyono
 Umur : 43 th
 Agama : Islam
 Pendidikan : SD
 Bahasa yang dikuasai : Bahasa Jawa
 Asli : Gondang
 Pekerjaan : —
5. Nama : Tursinem
 Umur : 33 th
 Agama : Islam
 Pendidikan : SD
 Bahasa yang dikuasai : Bahasa Jawa dan Indonesia
 Asli : Pakelen
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Nama : Nisren
 Umur : 20 th
 Agama : Islam
 Pendidikan : SD
 Bahasa yang dikuasai : Bahasa Jawa
 Asli : Pakelen
 Pekerjaan : Petani
7. Nama : Asan Mihardja
 Umur : 50 th
 Agama : Islam
 Pendidikan : SD
 Bahasa yang dikuasai :
8. Nama : Binah
 Umur : 21 th
 Agama : Islam
 Pendidikan : SD
 Bahasa yang dikuasai : Bahasa Jawa dan Indonesia
 Asli : Gondang
 Pekerjaan : Petani

9. Nama : Kartomihardjo
Umur : 60 th
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Bahasa yang dikuasai : Bahasa Jawa, Indonesia
Asli : Gondang
Pekerjaan : Pamong Desa

10. Nama : Sutarman
Umur : 41 th
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Bahasa yang dikuasai : Bahasa Jawa, Indonesia
Asli : Sela
Pekerjaan : Pamong Desa

11. Nama : Sarman
Umur : 32 th
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Bahasa yang dikuasai : Bahasa Jawa, Indonesia
Asli : —
Pekerjaan : Petani

12. Nama : Sukardjo
Umur : 50 th
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
Asli : Gondang
Pekerjaan : Petani

13. Nama : Sugiri
Umur : 34 th
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
Asli : Pakelen
Pekerjaan : Petugas Lapangan

14. Nama : Sumitro
 Umur : 42 th
 Agama : Islam
 Pendidikan : SD
 Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
 Asli : Sela
 Pekerjaan : Petani
15. Nama : Muhdi
 Umur : 17 th
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMTA
 Bahasa yang dikuasai : Bahasa Jawa; Indonesia
 Pekerjaan : —
 Asli : Pakelen
16. Nama : Sutinah
 Umur : 16 th
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMTA
 Bahasa yang dikuasai : Bahasa Jawa, Indonesia
 Pekerjaan : —
 Asli : Sela
17. Nama : Sarjo
 Umur : 67 th
 Agama : Islam
 Pendidikan : —
 Bahasa yang dikuasai : Jawa
 Pekerjaan : Petani
 Asli : Gondang
18. Nama : Sardin
 Umur : 25 th
 Agama : Islam
 Pendidikan : SD
 Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
 Pekerjaan : Petani
 Asli : Pakelen

19. Nama : Darsi
Umur : 32 th
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
Pekerjaan : Petani
Asli : Sela

20. Nama : Paiman
Umur : 75 th
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Bahasa yang dikuasai : Jawa
Pekerjaan : Petani
Asli : Sela

Untuk Desa Kutobanjarnegara

1. Nama : Sukarno
Umur : 45 th
Agama : Islam
Pendidikan : SMTA
Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
Pekerjaan : Lurah
Asli : Banjarnegara

2. Nama : Jumari
Umur : 42 th
Agama : Islam
Pendidikan : SR
Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
Pekerjaan : Pamong Desa
Asli : Banjarnegara

3. Nama : Sudarto
Umur : 42 th
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
Pekerjaan : Pamong Desa
Asli : Banjarnegara

4. Nama : Sarwono
 Umur : 41 th
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMTA
 Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
 Pekerjaan : Pegawai Negeri
 Asli : Banjarnegara
5. Nama : Sunarto
 Umur : 35 th
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMP
 Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
 Pekerjaan : Pamong Desa
 Asli : Banjarnegara
6. Nama : Mohammad Jadmo
 Umur : 45 th
 Agama : Islam
 Pendidikan : SR
 Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
 Pekerjaan : Pamong Desa
 Asli : Banjarnegara
7. Nama : Ngafif
 Umur : 33 th
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMEA
 Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
 Pekerjaan : Pegawai Negeri
 Asli : Banjarnegara
8. Nama : Suharno
 Umur : 37 th
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMTA
 Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
 Pekerjaan : Pegawai Negeri
 Asli : Banjarnegara

9. Nama : Rahmad
 Umur : 27 th
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMTA
 Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
 Pekerjaan : Pegawai Negeri
 Asli : Banjarnegara
10. Nama : Sunaryo
 Umur : 39 th
 Agama : Islam
 Pendidikan : SD
 Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
 Pekerjaan : Pamong Desa
 Asli : Banjarnegara
11. Nama : Mustamisl
 Umur : 30 th
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMP
 Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
 Pekerjaan : Pamong Desa
 Asli : Banjarnegara
12. Nama : Moh. Satibi
 Umur : 65 th
 Agama : Islam
 Pendidikan : SD
 Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
 Pekerjaan : Pamong Desa
 Asli : Banjarnegara
13. Nama : Muh. Hasim
 Umur : 56 th
 Agama : Islam
 Pendidikan : SD
 Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
 Pekerjaan : Buruh
 Asli : Banjarnegara

14. Nama : Muh. Sujud
Umur : 40 th
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Asli : Banjarnegara

15. Nama : Jumadi
Umur : 37 th
Agama : Islam
Pendidikan : SMTA
Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Asli : Banjarnegara

16. Nama : Sadli
Umur : 45 th
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Asli : Banjarnegara

17. Nama : Turmin
Umur : 31 th
Agama : Islam
Pendidikan : SMEA
Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Asli : Banjarnegara

18. Nama : Hadi
Umur : 16 th
Agama : Islam
Pendidikan : SMTA
Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
Pekerjaan : —
Asli : Banjarnegara

19. Nama : Indah Susianti
Umur : 45 th
Agama : Islam
Pendidikan : SMTA
Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
Pekerjaan : —
Asli : Banjarnegara

20. Nama : Kasdi
Umur : 43 th
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia
Pekerjaan : Buruh
Asli : Banjarnegara

Lampiran

Pedoman Wawancara :

I. Lokasi:

1. Dimanakah Letak Lokasi Desa Penelitian ?
2. Bagaimanakah komunikasi keadaan desa ?
3. Bagaimanakah komunikasi keadaan desa ?
4. Bagaimanakah lingkungan alam dari lokasi Penelitian ?
5. Bagaimanakah pola pemukiman dari daerah penelitian ?
6. Bagaimanakah keadaan penduduknya ?
7. Bagaimanakah mata pencaharian hidup dan teknologi Desa ?
8. Bagaimanakah latar belakang dari daerah penelitian ?

II. Kebutuhan masyarakat adanya sistim pengendalian sosial

1. Siapa sajakah tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan dalam bertingkah laku ?
2. Siapakah saja yang menjadi aparat desa dari area penelitian ?
3. Bagaimanakah pendapat tokoh-tokoh masyarakat tentang pelaksanaan sistem pengendalian sosial ?
4. Bagaimanakah pendapatnya para aparat desa tentang pelaksanaan pengendalian sosial ?
5. Bagaimanakah pendapat para orang tua tentang pelaksanaan pengendalian sosial ?
6. Bagaimanakah pendapat para remaja tentang pelaksanaan pengendalian sosial ?
7. Bagaimanakah pendapat para tokoh masyarakat tentang perkembangan pengendalian sosial ?

8. Bagaimanakah pendapat para orang tua tentang perkembangan pengendalian sosial ?
9. Bagaimanakah pendapat para remaja tentang perkembangan pengendalian sosial ?
10. Bagaimanakah pendapat masyarakat tentang peranan hukum terhadap pelaksanaan sistem pengendalian sosial ?
11. Bagaimanakah pendapat masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang mendukung sistem pengendalian sosial ?
12. Bagaimanakah kebiasaan kehidupan masyarakat sehari-hari?
13. Bagaimanakah pendapat masyarakat tentang perlunya pengendalian sosial ?
14. Bagaimanakah pendapat masyarakat tentang sikap dan kegiatan aparat desa dalam pelaksanaan pengendalian sosial ?
15. Hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan pengendalian sosial ?

III. Persepsi

Bagaimana persepsi masyarakat pada sistem pengendalian sosial yang berlaku di desa tersebut ?

1. Kesan mengenai pandangan umum di desa tersebut ?
2. Kesan tentang peran serta tokoh masyarakat dan para ulama?
3. Kesan tentang peran serta aparat desa dan aparat pemerintahan ?
4. Kesan tentang munculnya hambatan di desa itu ?
5. Apakah hambatan berperan sertanya tokoh masyarakat dan aparat desa itu karena masalah ekonomi atau masalah yang lain ?
6. Apakah kebiasaan atau kedatangan modernisasi yang menghambat peran serta itu ?
7. Pendapat dan saran lain mengenai peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan sistem pengendalian sosial ?

IV. Wawancara dengan aparat desa.

1. Bagaimana pendapatnya tentang kegiatan dan pelaksana berlakunya hukum bagi sistem pengendalian sosial ?

2. Bagaimana pendapatnya tentang hasil-hasil yang telah dicapai selama ini dalam bidang pelaksanaan pengendalian sosial ?
3. Bagaimana pendapatnya tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat ?
4. Bagaimana pendapatnya tentang adat-istiadat yang berlaku yang menunjang pengendalian sosial ?
5. Bagaimana pendapatnya tentang lembaga sosial desa hubungannya dengan pelaksanaan pengendalian sosial ?
6. Bagaimana pendapatnya tentang perilaku masyarakat yang menghambat terhadap pelaksanaan pengendalian sosial ?
7. Bagaimana hambatan di dalam menjalankan tugas selaku aparat desa ?
8. Apa saja motivasi yang membuatnya menjadi aparat desa.

V. Partisipasi Masyarakat.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengendalian sosial.

1. Bagaimana bentuknya, oleh siapa, bagaimana hasilnya?
2. Apa saja hambatan utama, cara mengatasinya, hasilnya?
3. Apa peran serta tokoh masyarakat, siapa, kegiatannya, apa bentuknya dan bagaimana hasilnya ?
4. Bagaimana partisipasi seluruh pamong desa ?
5. Bagaimana partisipasi para pemudanya ?
6. Saran-saran apa saja yang perlu diberikan ?

VI. Wawancara dengan para remaja.

1. Bagaimana pendapatnya tentang kemajuan jaman ?
2. Bagaimana pendapatnya tentang keadaan masyarakat saat sekarang ?
3. Bagaimana pendapatnya tentang pergaulan remaja saat sekarang ?
4. Bagaimana pendapatnya tentang keinginan-keinginan remaja saat sekarang ?
5. Bagaimana pendapatnya tentang perilaku orang tua dalam membimbing mereka ?

6. Bagaimana pendapatnya tentang peran serta mereka dalam pengendalian sosial ?
7. Bagaimana pendapatnya peran serta para tokoh masyarakat dalam pengendalian sosial ?

VII. Hal-hal yang perlu didokumentasikan

1. Situasi desa dalam area penelitian ini
2. Mografi desa dari kantor balai desa atau kelurahan
3. Menggambar peta desa dan psosisinya dengan kecamatan
4. Mengamati letak pemukiman desa
5. Mengamati pelaksanaan pengendalian sosial di desa

